

**ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN  
KEUANGAN DALAM PENGUKURAN KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU**

**SKRIPSI**



Oleh  
**NURLAELAH**  
**NIM : 14520134**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN  
KEUANGAN DALAM PENGUKURAN KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh  
**NURLAELAH**  
NIM : 14520134

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN  
KEUANGAN DALAM PENGUKURAN KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU**

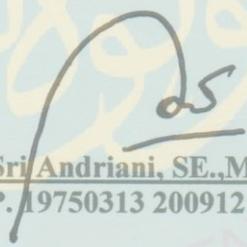
**SKRIPSI**

Oleh

**NURLAELAH**  
NIM : 14520134

Telah disetujui pada tanggal 06 Juni 2018

**Dosen Pembimbing,**

  
**Sri Andriani, SE., M.Si**  
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :  
**Ketua Jurusan,**

  
**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

Pengesahan

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU

#### SKRIPSI

Oleh  
**NURLAELAH**  
NIM : 14520134

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 26 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua

Zuraidah, SE., MSA  
NIP 19761210 200912 2 011

Tanda Tangan



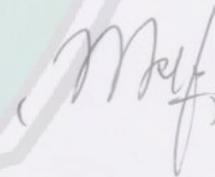
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si  
NIP 19750313 200912 2 001



3. Penguji Utama

Maretha Ika Prajawati, SE., MM  
NIP 19890327 201801 2 002



Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA  
NIP 19720322 200801 2 005

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlaelah

NIM : 14520134

Fakultas/Jurusan : Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BATU** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Juni 2018

Hormat saya,



Nurlaelah

NIM : 14520134

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggungjawab, bakti dan ungkapan rasa terimakasih saya kepada:

Kedua orang tua, Ayah Legiman dan Ibu Linawati tercinta, yang selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran, perhatian, serta kasih sayang dan keikhlasan yang tiada tara, selain itu juga senantiasa mengucapkan do'a-do'a yang tiada henti-hentinya untuk kakakku Iin Indrawati, adikku Shofa Shofiana dan M. Yudrik Ilmy Nafi'an. Ridha dari mereka yang merupakan kunci dalam perjalanan kehidupanku.

Seluruh anggota keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Terima kasih atas perhatian dan do'a yang selalu mengiringi dalam setiap langkah. Semoga selalu dapat membanggakan kalian.

Sabahat seperjuangan angkatan 2014, Uroh, Fahmi, A'yun, Dwi, Fitroh, Lutfi, Tia, Fina, Ryan, Devita, Vitana, Mas Kucluk, Nurul, Ulum, Faris, Annid, Arin, serta kakak tingkat, yang selalu menemani, memberi semangat dan motivasi. Terima kasih untuk do'a dan waktu kalian serta perhatian dan kesabarannya. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Almamater yang ku cintai.

## MOTTO

**Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu; sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar**

**(Q.S Al-Baqarah: 153)**

Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya

(H.R. Muslim)

Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu

(Ali bin Abi Thalib)

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, dan Ibu beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a, pengertian, dan dukungan.
7. Bapak Dicky, Mas Bayu, Ibu Nani, Ibu Dewi dan Karyawan Pemerintah Kota Batu lainnya yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data dalam rangka menyelesaikan skripsi.
8. Mas Kucluk yang selalu memberi masukan dan sabar menunggu dan menemani saat sedang mengerjakan skripsi.
9. Sahabat dan keluarga seperjuangan Bustanul Ulum, Prianka Tiersa Arindha, Annida'ul Islamiyah, Faris Al-Fahrizi, Nurul Khoiriyah. Orang-orang paling kocak dan istimewa dan selalu mensupport dalam melakukan penelitian ini.

10. Grand Teacher Qurrotul A'yun yang telah membimbing dalam setiap pelajaran dan Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 Uroh, Fahmi, Tia, Fitroh, Lutfi, Fina, Devita, Dwi, Vitana, Ryan, Dian, Yayang yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama.
11. Sahabat-sahabati PMII angkatan 2014, Pengurus HMJ Akuntansi 2016, Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi 2017 yang telah banyak memberi pelajaran yang mungkin tak pernah terulang di kemudian hari dan merasakan pahit manisnya berproses dan berjuang bersama.
12. Teman Hidup sekaligus keluarga saat di Malang Nadirotul Imamah, Delia Lailia Albid, Yetty Amelia, Rizky Nurlita, Isna, Yuni yang telah yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 27 Juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Teoritis.....	18
2.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan .....	18
2.2.2 Laporan Keuangan .....	26
2.2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	35
2.2.3.1 Pengertian pengukuran kinerja.....	35
2.2.3.2 Pengukuran kinerja.....	37
2.3 Kerangka Berpikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian .....	45

3.3 Subyek Penelitian.....	45
3.4 Data dan Jenis Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Analisis Data.....	48
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi.....	58
4.1.3 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Batu.....	59
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu.....	61
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	71
4.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Batu.....	71
4.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	75
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitan .....	16
Tabel 2.3 Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dan Sektor Swasta .....	32
Tabel 4.1 Neraca .....	66
Tabel 4.2 Laporan Realisasi .....	67
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas .....	68
Tabel 4.4 Tingkat Pengungkapan Neraca .....	72
Tabel 4.5 Tingkat Pengungkapan LRA.....	73
Tabel 4.6 Tingkat Pengungkapan Arus Kas.....	74
Tabel 4.7 Varians Pendapatan.....	75
Tabel 4.8 Varians Belanja Rutin.....	76
Tabel 4.9 Varians Belanja Investasi.....	77
Tabel 4.10 Persentase Tingkat Kemandirian .....	78
Tabel 4.11 Rasio Kemandirian.....	78
Tabel 4.12 Persentase Efektivitas .....	79
Tabel 4.13 Persentase Efisiensi.....	80
Tabel 4.14 Rasio Efektivitas .....	80
Tabel 4.15 Rasio Efisiensi .....	80
Tabel 4.16 Rasio Belanja Rutin .....	81
Tabel 4.17 Rasio Belanja Pembangunan.....	82
Tabel 4.18 Rasio Pertumbuhan 2016 .....	82
Tabel 4.19 Rasio Pertumbuhan 2017 .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....61



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Neraca Periode 2016-2017
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2016-2017
- Lampiran 3 : Laporan Arus Kas
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Biodata Peneliti
- Lampiran 6 : Bukti Konsultasi



## ABSTRAK

Nurlaelah, 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu”

Pembimbing : Sri Andriani SE., M.Si

Kata Kunci : Tingkat Pengungkapan, Laporan Keuangan, Kinerja.

---

Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan komponen penting dalam menciptakan suatu akuntabilitas sektor publik. Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi dan tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 mendefinisikan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Batu dilihat dari tingkat pengungkapan laporan keuangan, dimana Pemerintah Kota Batu memiliki opini wajar tanpa pengecualian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis studi kasus berdasarkan tiga pengukuran, yakni tingkat pengungkapan, analisis varians, dan analisis rasio keuangan. Adapun objek dalam penelitian ini merupakan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Batu. Serta subjek penelitian adalah Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Pengukuran Kinerja. selanjutnya data dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data melalui tiga tahap yakni pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan Kota Batu secara garis besar baik, sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu menyajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah, akan tetapi jika dilihat dari analisis varians pendapatan terjadi selisih negatif, sehingga kurangnya optimal dalam menggali dan memungut potensi pendapatan Daerah yang ada. Dan jika dilihat dari varians belanja, Pemerintah Kota Batu lebih memprioritaskan pada Belanja rutin daripada belanja modal/investasi.

## ABSTRACT

Nurlaelah, 2018, SKRIPSI. Title: "Analysis of Financial Statement Disclosure in Local Government Performance Measurement of Batu City"

Advisor : Sri Andriani SE., M.Si

Keywords : Disclosure Level, Financial Statement, Performance.

---

Financial statements in public sector organizations are an important component of creating a public sector accountability. Disclosure has a meaning not to cover and not hide. When associated with a financial statement, a *disclosure* means that the financial statements should provide sufficient information and explanation of the activity result of a business unit. Government Regulation No. 90 of 2010 defines performance as an output of an activity or the outcome of a program with quantifiable quantity and quality. The disclosure aims to measure the performance of Batu City Government seen from the level of financial statement disclosure, where Batu City Government has unqualified opinion.

In this research use descriptive qualitative research method by using case study analysis based on three measurement, namely disclosure level, variance analysis, and financial ratio analysis. The object in this study is the Regional Government Finance Agency of Batu City. And the subject of the study is the Financial Statement Disclosure Level in Performance Measurement. then the data is collected through observation, interview and documentation. By data analysis through three stages namely data collection, data analysis and conclusion.

The result of the research indicates that the level of disclosure of financial statements of Kota Batu in general is good, in accordance with accounting standard. It can be seen that the level of disclosure of financial statements of Batu City Government presents in accordance with Government Regulation number 71 of 2010 concerning Government accounting standard, but when viewed from the analysis of income variance happened negative difference, so that the lack of optimal in digging and collecting potential income of existing Area . And if seen from the expenditure variance, Batu City Government prioritizes on routine Shopping rather than capital expenditure / investment.

## الملخص

نور ليلة، 2018 ، مقال. العنوان " : تحليل معدل الإفصاح عن البيانات المالية في قياس أداء الحكومة المحلية لمدينة باتو "

المشرف : سري أندرياني SE، M.Si

كلمات البحث : مستوى الإفصاح، البيانات المالية، والأداء.

تعد البيانات المالية في مؤسسات القطاع العام عنصراً هاماً في خلق مساءلة القطاع العام. الإفصاح (أي الكشف) لا يغطي ولا يخفي. عند الإقران بالبيانات المالية ، يعني الكشف أن البيانات المالية يجب أن توفر معلومات وشرائحاً كافيين لأنشطة الوحدة التنظيمية. تحدد اللائحة الحكومية رقم 90 لعام 2010 الأداء كأداء نشاط أو مخرجات برنامج ذو كمية ونوعية قابلة للقياس الكمي. يهدف الكشف إلى قياس أداء حكومة مدينة باتو من مستوى الإفصاح عن البيانات المالية ، حيث تتمتع حكومة مدينة باتو برأي غير مؤهل.

استخدم هذا البحث أسلوب البحث الوصفي النوعي باستخدام تحليل دراسة الحالة على أساس ثلاثة مقاييس ، وهي مستوى الإفصاح ، وتحليل التباين ، وتحليل النسبة المالية. الهدف في هذه الدراسة هو وكالة تمويل الحكومة الإقليمية لمدينة باتو. وموضوع الدراسة هو مستوى الإفصاح عن البيان المالي في قياس الأداء. ثم يتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. من خلال تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل وهي جمع البيانات وتحليل البيانات والاستنتاج.

تشير نتيجة البحث إلى أن مستوى الإفصاح عن البيانات المالية لمدينة باتو بشكل عام جيد ، وفقاً للمعايير المحاسبية. يمكن ملاحظة أن مستوى الإفصاح عن البيانات المالية لحكومة مدينة باتو يتم تقديمه وفقاً للمادة 71 من اللائحة الحكومية لعام 2010 فيما يتعلق بالمعيار المحاسبي الحكومي ، لكن عند النظر إليه من تحليل تباين الدخل ، حدث فرق سلبي ، بحيث لا يكون الأمثل في الحفر وجمع الدخل المحتمل للمنطقة القائمة ، وإذا رأينا من تباين الإنفاق ، فإن حكومة مدينة باتو تعطي الأولوية للتسوق الروتيني بدلاً من الإنفاق الرأسمالي / الاستثمار.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang, sehingga semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh suatu organisasi sektor publik (seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, unit-unit kerja Pemerintah, departemen dan lembaga lembaga Negara), Tuntutan akuntabilitas sektor publik ini terkait perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009). Terlebih adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana pada undang-undang ini mengemukakan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh lembaga publik merupakan laporan keuangan publik yang berhak diperoleh oleh masyarakat (Hasanah dan Achmad, 2017).

Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan komponen penting dalam menciptakan suatu akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik agar memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah terkait informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 28 menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi Pemerintah SAP berbasis akrual yang meliputi

laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan .

Menurut Afifah (2010) mengemukakan dalam bukunya bahwa informasi laporan keuangan harus disajikan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan oleh pembaca informasi keuangan sektor publik. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan baik itu Pemerintah ataupun masyarakat dapat ditempatkan pada lembar muka (*On the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan (CALK). Salah satu aspek penting dari Pemerintah Daerah adalah masalah pengelolaan keuangan anggaran Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu Daerah tersebut (Mardiasmo, 2009).

Salah satu cara untuk menghindari masalah tentang pengelolaan keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengungkapkan laporan keuangan yang berakuntabilitas dan secara transparansi terhadap publik adalah dengan melakukan pengungkapan secara benar. Pandangan secara konseptual pengungkapan atau *disclosure* merupakan bagian yang sangat penting dari pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis pengungkapan dalam proses akuntansi merupakan langkah akhir dari kegiatan akuntansi yang berupa penyajian laporan keuangan suatu organisasi. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) menjelaskan pengungkapan atau *disclosure* sebagai berikut:

*“Disclosure means supplying information in the financial statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private*

*statements by made managementor information provided outside the financial statements.”*

Tingkat pengungkapan laporan keuangan menyajikan suatu informasi yang akan dilaporkan Pemerintah, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang luas untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip dalam hal tersebut yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (*full disclosure*), mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang ada dalam laporan keuangan Pemerintah mencerminkan serangkaian *trade off* penilaian. *Trade off* ini terjadi antara kebutuhan dalam mengungkapkan dengan secara cukup terinci hal-hal yang mempengaruhi keputusan pemakai, dengan dan kebutuhan untuk memadatkan penyajian laporan keuangan agar informasi dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga perlu memperhitungkan biaya pembuatan laporan keuangan dan penggunaan dalam laporan keuangan (Kieso, 2009).

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya (Hasanah dan Achmad, 2017). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sistem sentralisasi menjadi suatu sumber permasalahan yang hangat diperbincangkan pada era reformasi. Wacana akan desentralisasi yang muncul, mengakibatkan berbagai sorotan tajam terhadap kelemahan sistem sentralisasi.

Pada saat itu ancaman akan disintegralisasi bangsa dirasakan menguat akibat kurangnya perhatian kepada sebagian besar Daerah, sehingga desentralisasi dengan penerapan otonomi Daerah dirasa menjadi jalan keluarnya. Dengan adanya otonomi Daerah ini memberikan wewenang kepada kepala Daerah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi salah satu wujud kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Hasanah dan Achmad (2017) menjelaskan bahwa munculnya otonomi Daerah bersyarat akan kewajiban Pemerintah sebagai pengemban amanah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dimana masyarakat akan menilai Pemerintah dari kinerja mereka.

Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu kegiatan, program serta kebijakan secara kualitas dan kuantitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 mendefinisikan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Sedangkan menurut Bastian (2010) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran suatu organisasi mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi

yang tertuang dalam rumusan skema strategi (*strategi planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh suatu organisasi (Bastian, 2010). Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran *financial* saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja *non financial* (Mardiasmo, 2009:122). Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan), tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, atau manfaat program tersebut.

Penilaian dan pengukuran mengenai kinerja perlu dilakukan, guna menilai atau mengevaluasi hasil pencapaian suatu organisasi pada periode tertentu. Dari pengukuran ini maka para organisatoris atau Pemerintah dapat melakukan perbaikan mengenai kekurangannya yang dilakukan di periode sebelumnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* dan *non-financial*. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi (Mardiasmo, 2009). Kinerja keuangan daerah atau kemampuan Daerah merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan Daerah dalam menjalankan otonomi Daerah (Halim, 2007). Menurut Mardiasmo (2009) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja

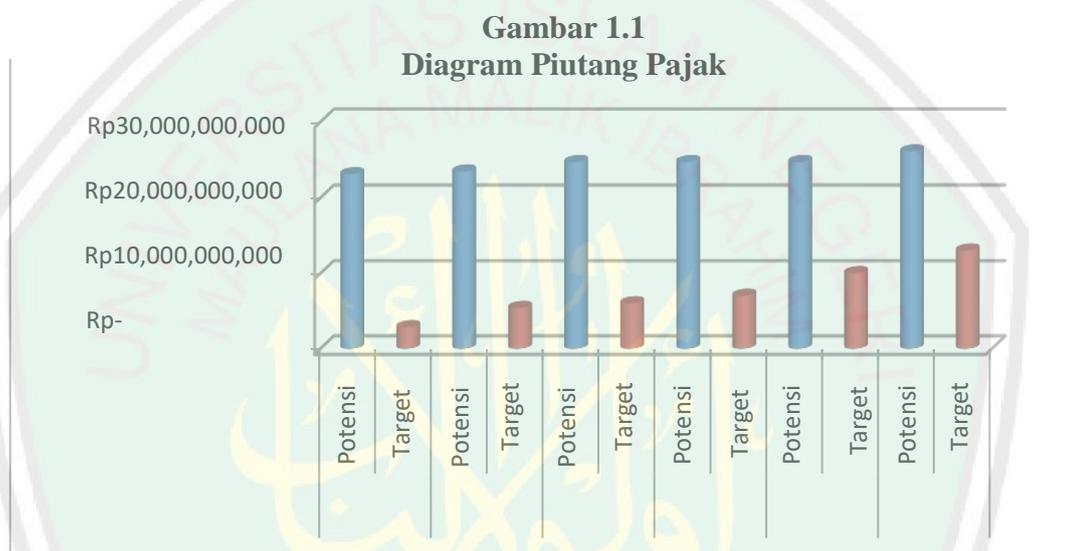
keuangan Daerah yang dituntut lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi Daerah. Terdapat dua aspek dalam reformasi pembiayaan. Aspek pertama adalah bahwa Daerah diberi kewenangan dalam mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli Daerah (PAD). Aspek kedua yaitu disisi manajemen dalam pengeluaran Daerah harus sesuai dengan asas otonomi Daerah bahwa pengelolaan Daerah harus lebih akuntabel dan transparan menuntut Daerah agar lebih efisien dan efisiensi dalam pengeluaran Daerah (Mardiasmo, 2009).

Penelitian mengenai metode pengukuran kinerja dan tingkat pengungkapan pemerintah Daerah pada beberapa entitas tertentu sudah banyak dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan oleh beberapa peneliti semisal metode pengukuran kinerja oleh Kusuma dan Ilat pada Pemerintah Kabupaten Minasa Utara Tahun 2012-2014, Karlina dan Handayani pada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Surabaya, dan pengukuran tingkat pengungkapan laporan keuangan oleh Medyanatul Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lime Puluh Kota, Setyaningrum dan Febriyani, Girsang dan Yuyetta pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012. Namun, penelitian ini akan berfokus pada tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah dengan menggunakan metode pendekatan *cash toward accrual* dengan menggunakan indikator rasio total skor dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu.

Kota Batu merupakan salah satu kota wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam praktiknya laporan auditor yang muncul pada laporan keuangan Pemerintah Kota Batu memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun menurut Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu periode 2017 mengungkapkan bahwa meskipun hasilnya wajar tanpa pengecualian (WTP) perlu adanya tindak lanjut dari catatan yang diberikan oleh BPK (Putri, 2017). Meskipun hasil opini audit pemerintah kota batu mendapatkan wajar tanpa pengecualian tetapi untuk penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa Timur (LAKIP) yang dikeluarkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi (Kemen PAN-RB) mendapatkan nilai C dan paling rendah se Jawa Timur. Hal ini karena tidak ada sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rencana kerja pemerintah Daerah diantara ketidaksinkronan ini seperti hasil yang dicapai tidak sesuai seperti yang direncanakan (Aji, 2018). Sedangkan LAKIP adalah media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 29 tahun 2010). Menurut Bayu Diktiarsa selaku sekretaris Malang *Corruption Watch* (MCW) mengatakan bahwasannya laporan keuangan Kota Batu tidak disampaikan secara terbuka kepada publik atau tidak transparansi. Menurut data yang diperoleh dari Malang *Corruption Watch* (MCW) bahwasannya Pemerintah Kota Batu mengalami kebocoran dalam penarikan anggaran pendapatan pajak hiburan, sejak tahun 2012, piutang pajak hiburan Kota Batu selalu diatas 20

miliar, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Batu untuk menargetkan pendapatan pajak hiburan Kota Batu. Sejak tahun 2012, target pendapatan atas pajak hiburan selalu pada kisaran angka dibawah 15 miliar (<https://mcw-malang.org>).

Berikut adalah diagram perbandingannya:



Sumber: Data Olahan LHP BPK 2012-2017 Kota Batu

Melihat diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami kebocoran anggaran di sektor penerimaan pendapatan pajak hiburan. Sudah seharusnya Pemerintah Kota Batu mulai meningkatkan kinerja dalam peningkatan pemungutan tunggakan pajak pengusaha hiburan di Pemerintah Daerah Kota Batu, mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat wisata dan hotel yang tentunya secara tidak langsung juga menyebabkan kerugian sosial dan lingkungan bagi masyarakat di Kota Batu.

Berdasarkan pemaparan diatas kondisi kota Batu dengan opini auditor wajar tanpa pengecualian, laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai C dan kurangnya kinerja dalam pendapatan atas pajak hiburan tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul: **“Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah adalah “Bagaimana analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu?”.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan konsep keuangan Pemerintah Daerah, dan teori-teori ilmu pengetahuan Akuntansi dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah lainnya yang akan mengambil keputusan baik dalam pendapatan, pengelolaan, atau penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas.

### 1.3.2.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan keuangan dalam pengukuran kinerja serta dapat dijadikan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Heri Atapson V Girsang dan Etna Nur Afri Yuyetta (2015) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012	Variabel Dependen 1. Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah Daerah  Variabel Independen 1. Proksi total asset	Kuantitatif	Variabel yang diuji menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan, atau dengan kata lain variabel ukuran Pemerintah Daerah, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat, diferensiasi fungsional Pemerintah Daerah, pembiayaan utang Pemerintah Daerah, dan umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012

Tabel 2.1

## Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Annafi Indra Tama (2015) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009	Menggunakan Variabel Paired <i>Samples T Test</i>	Kuantitatif	Terdapat perbedaan kinerja keuangan Daerah pada tingkat kemandirian keuangan, tingkat ketergantungan, tingkat kontribusi pajak Daerah, dan UU 28 tahun 2009 memberikan perubahan pada kinerja keuangan Pemerintah
3.	Wahidah Niken Kusumadewi, dan Ventje Ilat (2016) Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014	Varians Anggaran Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Keuangan	Kuantitatif Deskriptif	Kinerja Pemerintahan dalam mengelola pendapatan dikatakan baik, dibuktikan dari hasil varians pendapatan yang menunjukkan pemerintah Daerah merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang dianggarkan. Kinerja Pemerintah dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik dilihat tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari PAD, dan perlu mengoptimalkan kinerja belanja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik Daerah.

Tabel 2.1

## Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Medyanatul (2017), Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota)	<i>Compliance Indexs</i> (Indeks Kepatuhan)	Kualitatif	Hasil penelitian ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong pengungkapan yang cukup luas</li> <li>2. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, setiap daerah mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.</li> </ol>

Tabel 2.1

## Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Anis Karlina dan Nur Handayani (2017), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015	Kinerja Pemerintah dengan menggunakan rasio Keuangan APBD	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan Kurang baik dalam varians pendapatan.</li> <li>2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran belanja Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan baik, dikarenakan belanja operasional lebih tinggi daripada belanja pembangunan.</li> </ol>

Tabel 2.1

## Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
6.	Henny Agnecia Uliarta Simbolon dan Christophorus Heni Kurniawa (2018), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia	Variabel Dependen : tingkat pengungkapan Laporan Keuangan  Variabel independen : karakteristik Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Ukuran Oemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 2. Ukuran legislative, kekayaan Pemerintah Daerah, <i>Intergovermental revenue</i> , <i>Difrensiasi fungsional</i> , Spesialisasi pekerjaan, dan Rasio Kemandirian tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia

Penelitian diatas sebagian besar menjelaskan tentang kinerja Pemerintah Daerah, selain itu juga membahas tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah serta tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai pembeda dan persamaan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Heri Atapson V Girsang dan Etna Nur Afri Yuyetta (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif</li> <li>2. Menggunakan metode varians pendapatan dan varians pengeluaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan rasio Kemandirian</li> <li>2. Sama-sama membahas mengenai PP 70 tahun 2010</li> </ol>
2.	Annafi Indra Tama (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengguakan penelitian kualitatif</li> <li>2. Menggunakan PP 71 tahun 2010</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan rasio keuangan Daerah</li> </ol>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3.	Wahidah Niken Kusumadewi, dan Ventje Ilat (2016)	Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014	3. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 4. Menggunakan metode <i>compliance index</i> (indeks kepatuhan)	2. Sama-sama menggunakan metode varians pendapatan dan varians pengeluaran 3. Menggunakan rasio keuangan
4.	Medyanatul (2017)	Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lime Puluh Kota)	1. Menggunakan metode varians pendapatan dan varians pengeluaran 2. Menggunakan rasio keuangan Daerah	1. Menggunakan metode indeks kepatuhan 2. Sama-sama menggunakan PP 71 Tahun 2010
5.	Anis Karlina dan Nur Handayani (2017),	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015	1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Menggunakan metode varians pendapatan dan varians pengeluaran	1. Sama-sama menggunakan rasio keuangan

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
6.	Henny Agnecia Uliarta Simbolon dan Christophorus Heni Kurniawa (2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia	1. Metode penelitian menggunakan kualitatif 2. Menggunakan varians pendapatan dan varians pengeluaran	1. Menggunakan rasio kemandirian

Penelitian terdahulu hanya melakukan pengukuran terhadap akun-akun laporan keuangan melalui pengukuran analisis rasio keuangan saja, sedangkan untuk penelitian ini lebih memaparkan terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan menggunakan varians pendapatan, rasio keuangan, dan metode pendekatan *cash toward accrual* dengan menggunakan indikator rasio total skor sebagai suatu upaya efisiensi pengukuran kinerja.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

#### 2.2.1.1 Pengertian pengungkapan laporan keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) pada umumnya memiliki arti tidak ada yang ditutupi atau tidak ada yang disembunyikan. Apabila pengungkapan (*disclosure*) ini dikaitkan dengan laporan keuangan, maka *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak-pihak yang terkait serta penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit organisasi (Chariri dan Ghozali, 2007). Terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang

telah ditetapkan dalam standar, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Chariri dan Ghozali, 2007). Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) dalam Pemerintahan di Indonesia, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pengungkapan wajib dalam laporan keuangan mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pengungkapan lengkap (*full disclosure*) ialah laporan keuangan menyajikan informasi secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) merupakan informasi yang disajikan tidak diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan dalam laporan keuangan oleh suatu entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Biasanya disajikan dalam bentuk informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Tingkat pengungkapan laporan keuangan menyajikan informasi suatu organisasi yang akan dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Tingkat pengungkapan laporan keuangan sektor publik adalah suatu konsep abstrak yang tidak dapat diukur secara langsung sehingga penggunaan indeks pengungkapan

dalam penelitian ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi yang telah disajikan oleh organisasi sektor publik (Al Saeed 2006, dalam Ikhsan 2009).

#### 2.2.1.1 Tujuan pengungkapan laporan keuangan

Secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan suatu informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Definisi pengungkapan wajib dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi LKPD sesuai dengan SAP. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum (Bastian, 2005), sehingga kesesuaian pengungkapan dengan standar akuntansi merepresentasikan kepatuhan terhadap SAP (Bastian, 2010).

Luasnya pengungkapan yang diperlukan Pemerintah yaitu harus meentukan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan memberikan tambahan informasi untuk hal-hal berikut (Mardiasmo, 2009):

1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.

2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.
3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.
4. Deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas.
5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi.
6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya.

#### 2.2.1.2 Jenis-jenis pengungkapan

Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu :

### 1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure)

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan yang diharuskan dalam laporan tahunan menurut peraturan Bapepam. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dikeluarkan oleh Ketua BAPEPAM melalui keputusan nomor 17/PM/2002 atau VIII.G.7. Dalam praktik yang paling lazim digunakan adalah pengungkapan yang cukup (Adequate Disclosure). Pengungkapan yang cukup merupakan pengungkapan yang minimum yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh Bapepam, dengan kata lain pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Dalam pengungkapan sukarela, manajemen bebas untuk memberi informasi akuntansi maupun informasi lainnya di luar standar pengungkapan yang sudah ditetapkan. Pengungkapan sukarela berisi taksiran laba yang akan dibagi oleh manajemen, penyajian kepada publik, pengungkapan relasi investor, website, internet, press release, konferensi pers, informasi sukarela dalam laporan tahunan, juga semua informasi kebijakan keuangan perusahaan yang dapat dipakai untuk berbagai tujuan.

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dibagi mejadi 5 kategori, yaitu :

a. Data bisnis

Data bisnis yang berkaitan dengan operasional suatu perusahaan dan pengukuran kinerja level atas.

b. Analisis manajemen mengenai data bisnis

Analisis manajemen mengenai data bisnis meliputi suatu alasan pada perubahan operasi suatu perusahaan serta mencantumkan data yang terkait serta dampak trend bisnis pada suatu perusahaan.

c. *Forward looking information*

*Forward looking information* meliputi suatu peluang, resiko dan termasuk rencana-rencana manajemen yang ada pada perusahaan.

d. Informasi mengenai manajemen dan *shareholders*

Informasi mengenai manajemen dan *shareholders* meliputi informasi mengenai direktur, manajemen, dan pemegang saham yang ada pada perusahaan.

e. Latar belakang perusahaan

Latar belakang perusahaan meliputi tujuan suatu perusahaan dan ruang lingkup yang ada di perusahaan.

### 2.2.1.3 Pengukuran tingkat pengungkapan

Tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah diukur dengan membandingkan item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan menggunakan *compliance Indexs* (indeks kepatuhan). Adapun elemen-elemen dalam indeks tersebut akan diukur sebagai berikut:

#### 1. Neraca

Menurut PSAP no.01 neraca menyajikan sekurang-kurangnya mencakup pos-pos berikut ini:

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Aset tetap
- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Kewajiban jangka panjang
- i) Ekuitas

## 2. Laporan realisasi anggaran

Menurut PSAP no.02 laporan realisasi anggaran sekurang kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA
  - b) Belanja
  - c) Transfer
  - d) Surplus/deficit-LRA
  - e) Penerimaan pembiayaan
  - f) Pengeluaran pembiayaan
  - g) Pembiayaan neto, dan
  - h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
- ## 3. Laporan arus kas

Menurut PSAP no.03 laporan arus kas menyajikan informasi historis selama satu periode akuntansi mengenai perubahan kas dan setara kas berdasarkan :

- a) Aktivitas operasional
  - b) Investasi
  - c) Pendanaan
  - d) Transitoris
- ## 4. Catatan atas laporan keuangan

Menurut PSAP no.03 catatan atas laporan keuangan mengungkapkan laporan keuangan yang tidak diungkapkan dilaporan keuangan lainnya, seperti:

- a) Informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi
- b) Kebijakan fiscal dan ekonomi makro
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan
- d) Kebijakan akuntansi
- e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam pengukuran tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah standar akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu:

- a. Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dan diberi skor 0 jika tidak diungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Skor yang diperoleh dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
- c. Perhitungan indeks tingkat pengungkapan laporan keuangan diukur dengan rasio total skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang dapat diperoleh. Skor maksimal setiap blok berbeda sesuai penyesuaian yang telah dilakukan pada masing-masing blok.

## **2.2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan sektor publik merupakan gambaran dari posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Bastian, 2010). Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi sektor publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah

informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010 dalam laporan keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

#### 2.2.2.1 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan berfungsi sebagai media informasi keuangan suatu entitas bagi sejumlah pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan, memberikan informasi keuangan untuk menilai kinerja Pemerintah, kesesuaiannya dengan pengaturan perundang-undang, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan (Mardiasmo, 2009).

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam setiap pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercaya dengan cara (Bastian, 2010):

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya

- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi
- e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Laporan Keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda-beda dengan laporan keuangan yang ada pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen yang ada dalam laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki beberapa karakteristik laporan keuangan yang berbeda, kedua sektor juga memiliki persamaan yaitu kedua-duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

#### 2.2.2.2 Standar Akuntansi

Standar akuntansi yang ada di Indonesia berkembang menjadi lima pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Berikut adalah lima pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia :

##### 1. Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard (PSAK)

Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard (PSAK) adalah nama lain dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang

diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada Tahun 2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun).

2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

3. PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

4. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaannya; dan ED SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

5. Standar akuntansi pemerintah (SAP)

Pada penelitian ini menggunakan standar akuntansi pemerintah (SAP). Standar akuntansi pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengatur tentang standar akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari standar akuntansi Pemerintah sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yaitu diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*) oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia tidak dapat langsung melakukan penggantian dari sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*), maka dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan standar akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan standar akuntansi berbasis akrual. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Berikut komponen laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan finansial Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisah dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disusun berdasarkan standar akuntansi Pemerintah.

#### 2.2.2.3 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta

Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi bisnis/swasta merupakan entitas yang profit oriented, yaitu organisasi yang mempunyai tujuan menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba yang akan dinikmati oleh para pemilik atau anggota. Sumber pendanaannya berasal dari investor, kreditur, dan para anggota. Sedangkan Pemerintah dan organisasi non-profit memiliki tujuan dan layanan yang berbeda dari entitas bisnis. Tujuan dari pemerintah dan organisasi non-profit adalah menyediakan

layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar sumber dana yang diperoleh Pemerintah dan organisasi non-profit berasal dari pajak, donasi/sumbangan, hutang, laba perusahaan negara atau daerah dan sumber lainnya. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik memiliki tujuan utama dalam organisasi yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor swasta (entitas komersil/bisnis) tujuan utamanya adalah memaksimalkan laba perusahaan.



**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta**

<b>Perbedaan</b>	
Laporan Departemen Pemerintah	Laporan Keuangan Sektor Swasta
Fokus Finansial dan Politik	Fokus Finansial
Kinerja diukur secara finansial dan non finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Berkokus pada bagian organisasi	Berkokus pada organisasi secara keseluruhan
Melihat ke masa depan secara detail	Tidak dapat melihat masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan	Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi
Laporan diperiksa oleh <i>Treasury</i>	Laporan Keuangan diperiksa oleh auditor independen
<i>Cash Accounting</i>	<i>Accrual Accounting</i>
<b>Persamaan</b>	
<b>Dokumen-dokumen sumber</b> Berperan sebagai hubungan masyarakat ( <i>Public Relations</i> )	

Sumber : A. Likierman and A. Taylor, *Government's New Departemental Reports*, CACA (1990) dalam Henley, D. et al. (1992).

Berdasarkan PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

pengguna laporan keuangan Pemerintah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman

d. Pemerintah

Sedangkan pengguna laporan keuangan sektor swasta menurut Martani, dkk (2012) dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

a. Investor

Menilai suatu entitas dan kemampuan suatu entitas membayar deviden dimasa yang akan datang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham yang dimiliki oleh investor pada suatu entitas tersebut.

b. Karyawan

Kemampuan memberikan balas jasa, memberikan manfaat, memberikan pensiun kepada karyawan yang telah lanjut usia, dan memberikan kesempatan kerja.

c. Pemberi jaminan

Kemampuan membayar utang dan membayar bunga yang akan memengaruhi keputusan suatu entitas apakah entitas tersebut akan memberikan pinjaman atau tidak.

d. Pemasok dan kreditur lain

Kemampuan suatu entitas dalam membayar liabilititas pada saat jatuh tempo, dan dalam pembagian deviden disetiap tahunnya.

e. Pelanggan

Kemampuan suatu entitas dalam menjamin kelangsungan hidupnya, dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan

f. Pemerintah

Menilai bagaimana alokasi sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia) yang ada dalam suatu entitas tersebut.

g. Masyarakat

Menilai sebuah tren dan perkembangan suatu entitas yang telah dijalankan serta menilai kemakmuran suatu entitas tersebut.

### 2.2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

#### 2.2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran suatu organisasi mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategi (*strategi planning*) suatu organisasi (Bastian, 2010). Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas dalam suatu organisasi bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik di belanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusat pertanggung jawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja.

### 2.2.3.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Terdapat empat tujuan dalam sistem pengukuran kinerja keuangan Daerah (Mardiasmo, 2009), yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strateginya.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai *good congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### 2.2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Terdapat delapan manfaat dalam pengukuran kinerja keuangan Daerah (Mardiasmo, 2009), yaitu:

- a. Mengarahkan dalam mencapai target kinerja pemerintah yang telah ditetapkan
- b. Untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan pengendalian untuk memperbaiki kinerjanya.
- c. Membantu memahami proses kegiatan yang ada di pemerintah.
- d. Memberikan pemahaman tentang ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah.

- e. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*)
- f. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- g. Memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

#### 2.2.3.4 Pengukuran Kinerja

Penilaian laporan kinerja finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah disusun atau yang telah dibuat oleh Pemerintah. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009). Analisis Varians secara garis besar berfokus pada:

##### 1) Varians Pendapatan (Revenue Varians)

Varians pendapatan adalah semua penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

##### 2) Varians pengeluaran (*expenditure variance*)

###### (1) Varians belanja rutin

Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda Pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah.

(2) Varians belanja investasi/modal (*recurrent expenditure variance*)

Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

3) Rasio pengukuran kinerja keuangan

Menurut Harahap (2004) rasio keuangan adalah rasio yang diperoleh dari hasil nominal perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabilitas, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Menurut Halim (2007) dan Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah (Departemen Keuangan RI, 2006) mengemukakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Kemandirian keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan yang ada di Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$Rasio Kemandirian = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemerintah Daerah itu sendiri. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi kepada Daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli Daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang ada di Daerah (Halim, 2007).

$$Rasio Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Diterapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan Daerah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Rasio efektivitas perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah

Daerah. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen.

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal yang digunakan cenderung semakin kecil. Rasio aktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - (t - 1)}{PAD_{t - 1}} \times 100\%$$

### 2.2.3.5 Integrasi Islam

Nabi Syu'aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan, dan melarang mereka melihat (mengurangi) takaran dan timbangan. Seperti yang ditulis dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 sebagai berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَأَنْتُمْ الَّذِينَ خَلَقْتُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ (184)

*Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu.*

Seorang pemimpin harus menyampaikan amanat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, seperti yang ada dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58

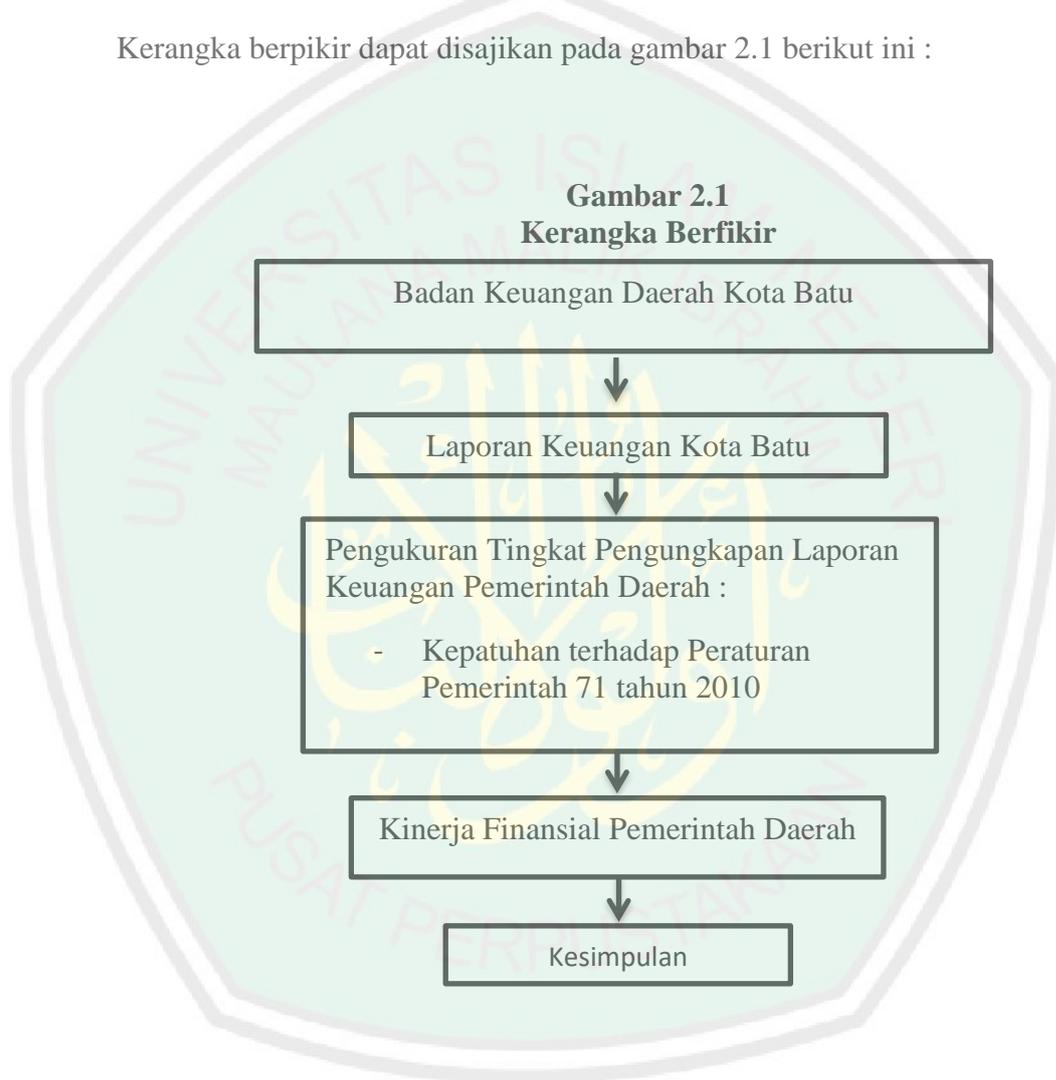
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu”.

Kerangka berpikir dapat disajikan pada gambar 2.1 berikut ini :



Berikut uraian dari gambar 2.1 adalah penelitian ini menggunakan data dari Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan periode 2016-2017. Dari data laporan keuangan akan dilakukan pengukuran tingkat pengungkapan laporan keuangan Kota Batu sesuai dengan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010, Dimana hasil dari kepatuhan tersebut akan berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang sesungguhnya, sesuai yang terjadi pada lapangan (*natural setting*) (Moleong, 2014). Dari pengertian tersebut, penulis masih mempersoalkan latar ilmiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan.

Jenis pendekatan ini adalah studi kasus di Pemerintah Daerah Kota Batu, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk pendekatan studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Menurut Moleong (2014) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik dalam satu variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu, kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data kualitatif yang dimulai reduksi data (pemilihan, pengumpulan, pengelompokan data), penyajian data (pengelolaan dan penyajian), dan penarikan kesimpulan (memberikan kesimpulan atas hasil analisis data mengenai pengungkapan laporan keuangan) sehingga pada akhirnya akan diketahui gambaran mengenai kinerja Pemerintah Kota Batu.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah dinas Pemerintah Daerah Kota Batu, yang berlokasi di kantor bersama Pemerintah Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu.

### **3.3 Subyek Penelitian**

Menurut Moleong (2014) Subjek penelitian atau informan adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Subyek penelitian atau responden pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu berdasarkan pengungkapan laporan keuangan daerah Kota Batu. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan yang terlibat dalam pembahasan tersebut.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Pengertian data primer menurut Moleong (2014) ialah data yang berasal dari sumber asli atau utama. Jadi data primer harus dicari melalui narasumber atau responden/informan. Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang dilakukan peneliti secara langsung kepada informan (subyek penelitian). Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada subjek yang akan diteliti yaitu badan keuangan Daerah Kota Batu yang mengelola keuangan daerah Kota Batu.

#### **2. Data Sekunder**

Sedangkan Data sekunder menurut Moleong (2014) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder adalah dalam berupa catatan atau dokumentasi pemerintah, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari laporan keuangan daerah Kota Batu.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, berikut uraiannya :

1. Library Research (penelitian kepustakaan) Yaitu pengumpulan data-data dari peraturan pemerintah 71 tahun 2010, buku jurnal tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah dalam pengukuran kinerja, buku akuntansi sektor publik, dan akuntansi keuangan daerah.

2. Field Research (penelitian lapangan) Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang dituju yaitu badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Batu. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi (pengamatan) Penulis mengamati langsung ke badan keuangan daerah Kota Batu untuk mengetahui kegiatan yang ada di dinas Pemerintah Daerah tersebut.
- b. Interview (wawancara)  
Wawancara adalah percakapan terkait penelitian dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti akan diadakan wawancara langsung dengan kepala sub bidang pembinaan pengembangan kebijakan dan sistem akuntansi, Kepala sub bidang pelaporan pendapatan dan pembiayaan, serta Malang *corruption watch* (MCW)
- c. Dokumentasi (mengumpulkan data)  
Dokumentasi adalah mengumpulkan data penelitian dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari badan keuangan Daerah.

### 3.6 Analisis Data

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian akan menguraikan beberapa langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data laporan keuangan Pemerintah Kota Batu seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan periode 2016-2017

2. Analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu

Menganalisis laporan keuangan untuk mengolah data terkait tingkat pengungkapan laporan keuangan kota Batu, dengan menggunakan *compliance indexs* (indeks kepatuhan). Tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah diukur dengan membandingkan item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tingkat rincian akun yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1) Neraca

Menurut PSAP no.01 neraca menyajikan sekurang-kurangnya mencakup pos-pos berikut ini:

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Aset tetap

- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Kewajiban jangka panjang
- i) Ekuitas

2) Laporan realisasi anggaran

Menurut PSAP no.02 laporan realisasi anggaran sekurang kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/deficit-LRA
- e) Penerimaan pembiayaan
- f) Pengeluaran pembiayaan
- g) Pembiayaan neto, dan
- h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

3) Laporan arus kas

Menurut PSAP no.03 laporan arus kas menyajikan informasi historis selama satu periode akuntansi mengenai perubahan kas dan setara kas berdasarkan :

- a) Aktivitas operasional
- b) Investasi
- c) Pendanaan
- d) Transitoris

#### 4) Catatan atas laporan keuangan

Menurut PSAP no.03 catatan atas laporan keuangan mengungkapkan laporan keuangan yang tidak diungkapkan dilaporan keuangan lainnya, seperti:

- a) Informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi
- b) Kebijakan fiscal dan ekonomi makro
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan
- d) Kebijakan akuntansi
- e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Adapun elemen-elemen dalam indeks tersebut akan diukur sebagai berikut:

- a. Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dan diberi skor 0 jika tidak diungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
  - b. Skor yang diperoleh dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
3. Dalam pengukuran kinerja dapat diukur menggunakan analisis varians dan rasio, yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya, diantaranya yaitu:
- a) Varians Pendapatan (*revenue varians*)
  - b) Varians Pengeluaran (*expenditure variance*)
    - a. Varians belanja rutin
    - b. Varians belanja investasi/modal

### c) Rasio Keuangan

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi Daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli Daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2007).

#### b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Diterapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \\ \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \end{aligned}$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin

tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2007).

c. Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah Daerah memprioritaskan dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal yang digunakan cenderung semakin kecil (Halim, 2007).

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - (t - 1)}{\text{PAD } t - 1} \times 100\%$$

4. Interpretasi dan kesimpulan atas pengolahan data untuk pengukuran tingkat pengungkapan dan analisis kinerja pemerintah daerah

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Gambar Umum Objek Penelitian

Jawa Timur secara geografis merupakan kota administratif salah satunya adalah Jember, dan ditambah Kota administratif lagi yang sangat diandalkan sebagai sentra wisata di Jawa Timur, yaitu Kota Batu. Kelahiran ini pada tanggal 6 Maret 1993 dengan Walikota pertamanya Drs. Chusnul Arifien Damuri. Pelantikan dan peresmian itu dilakukan di kantor Pembantu Bupati Malang di Batu yang terletak di pusat kota di Jalan Panglima Sudirman No. 98. Pelantikan itu langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, hadir juga Bupati Malang, Drs. Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya. Kelahiran berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatif Batu yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan).

Saat itulah Batu sebagai klasifikasi kota yang sedang menyiapkan diri untuk lebih meningkatkan prestasinya. Prestasi pertama yang diraih adalah adanya Gerakan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) yang secara simbolis dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 1993, lalu diciptakannya semboyan

Batu beramal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bersih
2. Elok
3. Rapi
4. Aman
5. Manusiawi
6. Agrowisata dan Industri
7. Lestari

Dalam bidang kebersihan Batu mampu meraih piala adipura sebanyak 4 kali berturut-turut (mulai tahun 1993-1996) untuk klasifikasi sedang. Selain prestasi-prestasi di atas, Kotatiff Batu mulai membangun sarana dan prasarana yang memadai khususnya bisa mendukung sektor kepariwisataan, perdagangan dan industri. Sarana dan prasarana itu antara lain yaitu:

1. Sarana Transportasi
2. Sarana Perhubungan
3. Sarana Penerangan
4. Sarana Perbelanjaan
5. Sarana Kesehatan
6. Sarana Hiburan
7. Sarana Keamanan

Selain prestasi, sarana dan prasarana di atas, Kotatiff Batu juga biasa dikunjungi sebagai tempat acara-acara penting daerah maupun Nasional, contoh : biasa dibuat Konferensi Pers, bahkan pada saat MTQ ke-19 tingkat Jawa Timur, Malang ditempati sebagai tuan rumahnya dan menunjuk Kota Batu yang akan dijadikan tempat berlangsungnya MTQ tersebut. Hotel-hotel bertaraf internasional banyak dibangun dan kesemuanya memiliki fasilitas lengkap, seperti kamar standard, royal suite, cottage, tennis court, kolam renang, ruang pertemuan, squash court, bar, diskotek, kafe, kebun buah (apel, jeruk), kebun sayur serta fasilitas lainnya.

Perkembangan Kotatiff Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang hampir menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju maka banyak warga dari Kotatiff Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan, organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status Kotatiff Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya. Dukungan-dukungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi Kota Administratif yang diperintah oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu Tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 17 Oktober 2002 secara resmi Kotatiff Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota Batu. Esok harinya masyarakat Kota Batu menyambutnya dengan bersyukur pada Allah SWT, mulai menyambut dengan acara syukuran tumpengan bersama, pemasangan spanduk-spanduk yang membanjiri setiap jalan dan sudut Kota Batu. Setelah Batu ditingkatkan statusnya dengan pejabat Walikotanya Drs. Imam Kabul, Batu ingin meningkatkan lagi pembangunannya, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sejak statusnya meningkat, Pemerintah Kota Batu bersama masyarakat mulai menyiapkan diri bagaimana agar pamor dan citra kota dingin ini tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri. Berikut kronologis Terbentuknya Pemerintah Kota Batu :

1. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan Kecamatan dalam lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Pada tahun 1997 Kecamatan Batu sebagai Daerah Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah Kabupaten Malang, yang meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.

3. Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya kemudian berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001, maka tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan Kota Batu menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang yang meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 Desa serta Kelurahan.
4. Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2002 diadakan pemilihan anggota DPRD Kota Batu. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2002 DPRD Kota Batu dilantik. Setelah DPRD Kota Batu terbentuk, maka secara resmi dan sah Pemerintah Kota Batu telah memiliki Badan Legislatif dan secara sah pula DPRD berhak dan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Pada hari Senin tanggal 4 November 2002 diadakan Pemilihan Kepala Daerah dan terpilih Drs. H. Imam Kabul M.Si yang berpasangan dengan Drs. M. Khudhori sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batu yang pertama.
6. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 dilaksanakan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu oleh Gubernur Imam Utomo.
7. Pada tanggal 26 Agustus 2007 Walikota Batu Drs. H. Imam Kabul M.Si. meninggal dunia dan tanggal 20 September 2007 Drs. M. Khudhori yang pada waktu itu sebagai Wakil Walikota Batu dilantik menjadi Walikota Batu yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur.

8. Tanggal 25 Nopember 2007 masa jabatan Walikota Batu berakhir dan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 2007 Nomor : 131.35-321 Tahun 2007 diangkat Mayjen TNI (Purn) IMAM UTOMO S sebagai Penjabat Walikota Batu.
9. Pada tanggal 26 Nopember 2007 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.422/65/011/2007 ditunjuk Sdr. Drs. SOERJANTO SUBANDI, MM Kepala Badan Koordinasi Wilayah III Malang sebagai Pelaksana Tugas Harian Walikota Batu.
10. Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah tanggal 5 November 2007 pasangan calon Walikota Batu EDDY RUMPOKO dengan calon Wakil Walikota Batu H.A. BUDIONO memperoleh suara terbanyak.

#### 4.1.2 Aspek geografi dan demografi

Luasan wilayah Kota Batu adalah 19.908,72 hektar dan secara administrasi terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu :

##### 1. Kecamatan Batu

Luas wilayah Kecamatan Batu : 4.545,81 hektar

Jumlah Desa/Kelurahan : 4 kelurahan dan 4 desa

Jumlah RW/RT : 96 RW dan 453 RT.

##### 2. Kecamatan Junrejo

Luas wilayah Kecamatan Batu : 2.565,02 hektar

Jumlah Desa/Kelurahan : 1 kelurahan dan 6 desa

Jumlah RW/RT : 59 RW dan 240 RT.

### 3. Kecamatan Bumiaji

Luas wilayah Kecamatan Batu : 12.797,89 hektar

Jumlah Desa/Kelurahan : 9 desa

Jumlah RW/RT : 82 RW dan 429 RT

Adapun batas administrasi wilayah Kota Batu sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
Sebelah Selatan	: Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
Sebelah Barat	: Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
Sebelah Timur	: Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

#### 4.1.3 Visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Batu

##### Visi Kota Batu

Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional ditunjang oleh pendidikan yang baik dan berdaya saing ditopang sumber daya alam, manusia, dan budaya yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa.

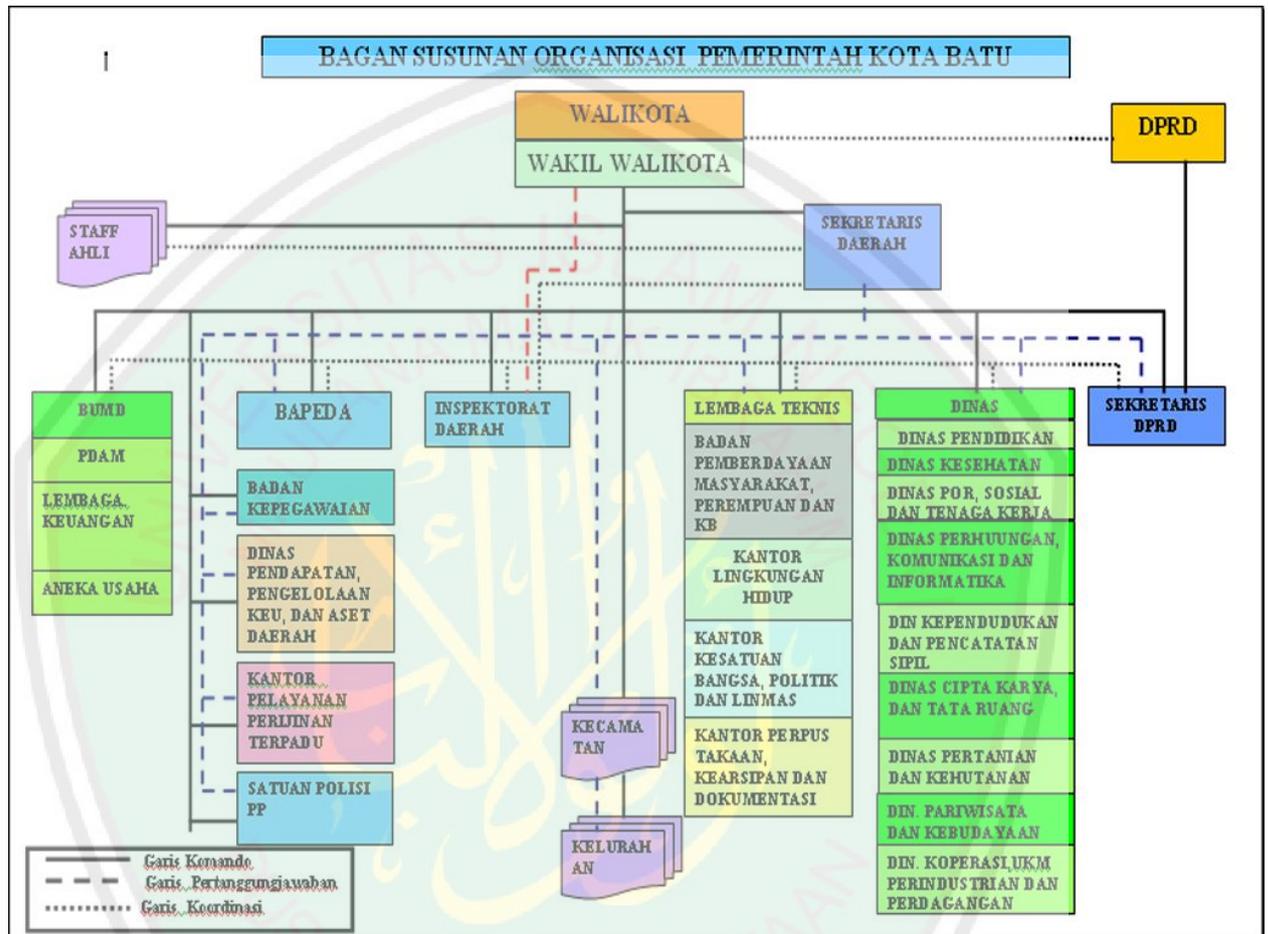
##### Misi Kota Batu

1. Meningkatkan kualitas hidup antar umat beragama
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintah Kota Batu
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik di Kota Batu

4. Meningkatkan peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan Internasional
5. Optimalisasi Pemerintah Daerah Kota Batu
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan Kota Batu
7. Peningkatan kualitas kesehatan
8. Pengembangan infrastruktur khususnya dalam perkantoran Pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas
9. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
11. Pemberdayaan masyarakat melalui UKM dan koperasi

## 4.1.4 Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu**



Sumber : Pemerintah Daerah Kota Batu

#### 4.1.5 *Job Description* Dinas Pemerintah Daerah Kota Batu :

Setiap organisasi memiliki *job description* di setiap bagian, berikut adalah *Job description* yang ada pada Dinas Pemerintah Kota Batu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang pendidikan serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang kepemudaan

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

3. Dinas Pariwisata

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pariwisata serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang kebudayaan

4. Dinas Komunikas dan Informasi

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang komunikasi dan informasi serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang statistik dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang persandian.

5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang penanaman modal dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang tenaga kerja.

6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang perpustakaan serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang kearsipan.

7. Dinas Kesehatan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang kesehatan

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pertahanan.

10. Dinas Lingkungan Hidup

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang lingkungan hidup.

#### 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### 12. Dinas Perhubungan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang perhubungan.

#### 13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang perindustrian dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang perdagangan.

#### 14. Dinas Petanian

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang pertanian serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang kelautan dan perikanan.

#### 15. Dinas Sosial

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang sosial.

#### 16. Dinas Ketahanan Pangan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang pangan.

#### 17. Dinas Penanggulangan Kebakaran

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

#### 18. Satuan Polisi Pamong Praja

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### 4.1.6 Laporan keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan gambaran dari posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Bastian, 2010). Dalam Penelitian ini dibutuhkan empat laporan keuangan, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu:

##### 1. Neraca Pemerintah Kota Batu

Neraca Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah neraca periode 31 Desember 2016 – 31 Desember 2017 yang disajikan secara penuh dalam lampiran 1 sedangkan ringkasannya ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel. 4.1**  
**Pemerintah Kota Batu**  
**Neraca**

**Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017**

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Aset Lancar	116.089.421.564,69	181.133.000.133,82
Investasi Jangka Panjang	22.760.573.286	26.800.573.286,00
Aset Tetap	1.461.032.545.560,60	1.478.024.998.843,19
Dana Cadang	0	0
Aset Lainnya	51.573.924.279,21	45.970.541.214,36
Jumlah Aset	1.651.456.464.690,50	1.731.929.113.477,37
Kewajiban Jangka Pendek	937.773.805,33	10.121.216.932,66
Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Jumlah Kewajiban	937.773.805,33	10.121.216.932,66
Ekuitas	1.650.520.690.885,16	1.721.807.896.544,71
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.651.456.464.690,50	1.731.929.113.477,37

Sumber : Data diolah, Laporan secara detail ada pada lampiran 1

Berdasarkan table 4.1 dapat diketahui bahwa aset yang dimiliki Pemerintah Kota Batu meningkat, dari Rp 1.651.456.464.690,50 hingga Rp 1.731.929.113.477,37. Kewajiban jangka pendek yang ada pada Pemerintah Kota Batu meningkat sangat tinggi sekali dari Rp 937.773.805,33 hingga Rp. 10.121.216.932,66, pada kewajiban jangka pendek tersebut terdapat pos pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Dan ekuitas Pemerintah Kota Batu meningkat, dari Rp. 1.650.520.690.885,16 hingga 1.721.807.896.544,71.

## 2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah laporan realisasi anggaran periode 31 Desember 2016 – 31 Desember 2017 yang disajikan secara penuh dalam lampiran 2 sedangkan ringkasannya ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pemerintah Kota Batu**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017**

Uraian	2016 (Rp)		2017 (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan-LRA	826.995.638.282,88	803.450.046.047,54	859.991.508.077,69	849.443.727.270,06
Belanja	859.790.122.051,82	780.506.520.832,98	876.795.937.467,49	728.420.680.465,85
Transfer	55.697.742.299,30	39.180.028.293	51.411.293.600	51.021.281.139
Surplus/ (Devisit)	(88.492.226.068,24)	(16.236.503.078)	(68.215.722.989,80)	70.001.765.665
Pembiayaan netto	88.492.226.068,24	88.492.226.068,24	68.215.722.989,80	68.268.701.558,07
SILPA	0	72.255.722.989,80	0	138.270.467.223,28

Sumber : Data diolah, Laporan secara detail ada pada lampiran 2

Berdasarkan table 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 meningkat dari Rp.803.450.046.047,54 hingga Rp. 849.443.727.270,06 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami penurunan, dari Rp. 780.506.520.832,98 hingga Rp.728.420.680.465,85 dikarenakan menurunnya belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Surplus pada Pemerintah Daerah Kota Batu pada 2016 Rp (16.236.503.078) dan pada tahun 2017 Rp 70.001.765.665. Pembiayaan netto pada Pemerintah Daerah Kota Batu pada tahun 2016 Rp. 88.492.226.068,24 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 68.268.701.558,07, sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 72.255.722.989,80 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 138.270.467.223,28.

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah laporan arus kas periode 31 Desember 2016 – 31 Desember 2017 yang disajikan secara penuh dalam lampiran 3 sedangkan ringkasannya ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Laporan Arus**  
**Pemerintah Kota Batu**  
**Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017**

Uraian	2016	2017
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Jumlah Arus Kas Masuk	803.450.046.047,54	849.443.727.270,06
Jumlah Arus Kas Keluar	645.317.840.798,98	636.859.020.664,85
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	158.132.205.248,56	212.584.706.605,21
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(174.368.708.327)	(142.582.940.940)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(3.000.000.000)	(4.040.000.000)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(19.236.503.078,44)	65.961.765.665,21
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	72.308.701.558,07	90.559.053.068,24
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	138.270.467.223,28	70.004.798.037,63
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	-	2.250.924.952,17
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS 2016	-	1.070.592.314,53
Saldo Akhir Kas	73.326.315.304,33	138.270.467.223,28

Sumber : Data diolah, Laporan secara detail ada pada lampiran 3

Berdasarkan 4.3 jumlah arus bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp. 158.132.205.248,56 dan 212.584.706.605,21 arus bersih dari aktivitas Investasi pada tahun 2016 sebesar (Rp.174.368.708.327) dan pada tahun 2017 sebesar (Rp.142.582.940.940) arus bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 sebesar (Rp.3.000.000.000) dan pada tahun 2017 sebesar (Rp.4.040.000.000), sehingga pada tahun 2016 menghasilkan saldo akhir sebesar Rp.73.326.315.304,33 dan pada tahun 2017 menghasilkan saldo akhir sebesar Rp. 138.270.467.223,28.

Laporan keuangan pada Pemerintah Kota Batu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indoseia. Hal ini disampaikan oleh Dicky Hartawan selaku kepala sub bidang pembinaan pengembangan kebijakan dan sistem akuntansi dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis 26 April 2018 Pukul 14.11 WIB di Pemerintah Daerah Kota Batu:

*“Untuk pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu sendiri kurang lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, karena memang pelaporan keuangan sektor publik harus sesuai dengan peraturan tersebut, dan untuk transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu telah menggunakan accrual basis disetiap transaksinya.”*

Sedangkan untuk transparansi laporan keuangan Pemerintah Kota Batu itu sangat kurang. Hal tersebut disampaikan oleh Bayu Diktiarsa selaku sekretaris Malang *Corruption Watch* (MCW) dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu 28 April 2018 Pukul 11.36 WIB di kantor Malang *Corruption Watch* (MCW):

*“Dalam transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu itu sangat kurang sekali, hingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Baru yang ada di website Pemerintah Kota Baru yang ada hanya sampai periode 2014, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya laporan keuangan Pemerintah Daerah harus transparansi agar masyarakat Kota Batu paham keuangan Kota Batu itu digunakan untuk apa saja.”*

Sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo (2009) bahwasannya pembuatan laporan keuangan sektor publik adalah salah satu bentuk kebutuhan dan harus transparansi untuk syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) atas aktivitas pengelolaan. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kota Batu mempunyai kebijakan sendiri dalam pengambilan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Dewi Islamiati selaku kepala sub bidang pelaporan pendapatan dan pembiayaan dalam wawancara yang dilakukan pada Hari Senin 30 April 2018 Pukul 13.30 di Pemerintah Daerah Kota Batu:

*“Pemerintah Daerah Kota Batu memiliki kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan persyaratan mengajukan permohonan ijin dalam pengambilan data Pemerintah Kota Batu baik itu laporan keuangan ataupun informasi lainnya, pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan dengan cara online ataupun offline dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).”*

Sehingga dalam pengambilan informasi yang ada dalam Pemerintah Daerah Kota Batu harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Batu itu sendiri, terutama dalam pengambilan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu harus mengajukan permohonan secara offline agar mendapatkan laporan keuangan Daerah yang terupdate.

## 4.2 Analisis Hasil Penelitian

### 4.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Batu

Dalam pengungkapan laporan keuangan Pemerintah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan disajikan dengan basis akrual. Dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### 1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi atau entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang dalam neraca. Hasil indeks pengungkapan neraca pada tahun 2016 dan 2017 yang seharusnya diungkapkan adalah 34 item yang terdiri dari aset (aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya), kewajiban (kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang), dan ekuitas. Sedangkan total pengungkapan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Batu adalah 46 item, maka cara perhitungan persentase pengungkapan neraca yaitu item yang harus diungkapkan dibagi dengan total item yang diungkapkan pada neraca Pemerintah Kota Batu, maka persentase pengungkapannya yaitu :

**Tabel 4.4**  
**Neraca**

Tahun	Pengungkapan Seharusnya	Total Pengungkapan	Hasil tingkat pengungkapan (%)
2016	34	46	74
2017	34	46	74

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 persentase tingkat pengungkapan neraca pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 74%, dengan demikian pengungkapan neraca pada Pemerintah Kota Batu tidak menambahkan atau mengurangi pos pos yang ada dalam neraca.

## 2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Hasil indeks pengungkapan pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2016 yang seharusnya diungkapkan adalah 29 item sedangkan total pengungkapan pada laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Batu adalah 33 item, dan pada tahun 2017 item yang seharusnya diungkapkan adalah 29 item sedangkan total pengungkapan pada laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Batu adalah 34 item, yang terdiri dari pendapatan (pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, transfer

pemerintah pusat, dan transfer pemerintah provinsi), lain-lain pendapatan yang sah, belanja (belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga), transfer, pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan), maka cara perhitungan persentase pengungkapan laporan realisasi anggaran yaitu item yang harus diungkapkan dibagi dengan total item yang diungkapkan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Batu, maka persentase pengungkapannya yaitu:

**Tabel 4.5**  
**Laporan Realisasi Anggaran**

Tahun	Pengungkapan Seharusnya	Total Pengungkapan	Hasil tingkat pengungkapan (%)
2016	29	33	88
2017	29	34	85

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.5 persentase tingkat pengungkapan laporan realisasi anggaran pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 88% dan 85, dengan demikian pengungkapan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Batu menambahkan satu akun yang ada dalam laporan realisasi anggaran yaitu terdapat akun dana alokasi khusus tambahan P3K2.

### 3. Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Hasil indeks pengungkapan laporan arus kas pada tahun 2016 dan 2017 yang seharusnya diungkapkan adalah 34 item terdiri dari Arus

kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris. Sedangkan total pengungkapan pada laporan arus kas adalah 44 item, maka cara perhitungan persentase pengungkapan laporan arus kas yaitu item yang harus diungkapkan dibagi dengan total item yang diungkapkan pada laporan arus kas Pemerintah Kota Batu. Maka persentase pengungkapan arus kas Pemerintah Kota Batu yaitu :

**Tabel 4.6**  
**Laporan Arus Kas**

Tahun	Pengungkapan Seharusnya	Total Pengungkapan	Hasil tingkat pengungkapan (%)
2016	34	44	77
2017	34	44	77

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.6 persentase tingkat pengungkapan laporan arus kas pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 77%, dengan demikian pengungkapan laporan arus kas pada Pemerintah Kota Batu tidak menambahkan atau mengurangi pos pos yang ada dalam neraca.

#### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan. Hasil indeks pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu pada tahun 2016 sebesar 35%

sedangkan pada tahun 2017 sebesar 25%, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sudah mencakup informasi secara umum dasar penyajian keuangan, ekonomi makro dan kebijakan keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, penjelasan informasi non keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan.

#### 4.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu

##### 1. Varians Pendapatan (*Revenue Varians*)

Varians pendapatan dapat mencerminkan kinerja dalam pendapatan keuangan Daerah, berikut varians pendapatan yang ada dalam Pemerintah Daerah Kota Batu yaitu :

**Tabel 4.7**  
**Varians Pendapatan**

Tahun	Realisasi	Anggaran	Varians (Rp)	Varians (%)
2016	803.450.046.047,54	826.995.638.282,88	(23.545.592.235,3)	-3
2017	849.443.727.270,06	859.991.508.077,69	(10.547.780.807,6)	-1

Sumber :Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran pendapatan daerah, selisih yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp 23.545.592.235,3 atau -3% dan 10.547.780.807,6 atau -1%. Pada Selisih negatif ini mencerminkan bahwa kurang optimalnya pemerintah dalam menggali dan memungut potensi pendapatan daerah yang ada.

## 2. Varians Pengeluaran (*expenditure variance*)

### a. Varians Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang ada di Pemerintah Daerah Kota Batu, sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Varians Belanja Rutin**

Tahun	Realisasi	Anggaran	Varians (Rp)	Varians (%)
2016	605.010.937.005,98	649.196.998.456,06	(44.186.061.450,1)	-7
2017	585.016.175.525,85	683.194.211.946,49	(98.178.036.420,6)	-14

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja rutin pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah, selisih yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp 44.186.061.450,1 dan 98.178.036.420,6. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja, yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian terjadi adanya efisiensi atau penghematan anggaran, pada tahun 2016 sebesar 44.186.061.450 atau 7% dari total APBD dan pada tahun 2017 sebesar 98.178.036.420 atau 14%. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentase memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang cukup signifikan dan dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja.

b. Varians Belanja Investasi/Modal (*recurrent expenditure variance*)

Belanja investasi/modal yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan Pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Berikut varians belanja investasi/modal Pemerintah Daerah Kota Batu:

**Tabel 4.9**  
**Varians Belanja Investasi/Modal**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	Varians (%)
2016	209.342.923.595,76	174.368.708.327,00	(34.974.215.268,8)	-20
2017	191.601.725.521,00	142.582.940.940,00	(49.018.784.581)	-34,4

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja modal pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah, selisih yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp 34.974.215.268,8 dan 49.018.784.581. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja. Pada anggaran belanja investasi/modal Pemerintah Kota Batu mengalami penurunan dan jika dilihat dari persentase varians belanja investasi/modal mengalami peningkatan sebesar 14,4%

3. Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Rasio keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu dapat kita analisis dengan menggunakan APBD yang ada di Pemerintah Kota Batu. Berikut rasio keuangan yang diteliti:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2012:232).

**Tabel 4.10**  
**Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio kemandirian dapat kita analisis melalui pendapatan asli daerah (PAD) periode 2016-2017 dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman pada periode 2016-2017. Maka hasil perhitungan rasio kemandirian Daerah Kota Batu dapat dilihat pada table 4.6

**Tabel 4.11**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kota Batu tahun 2016-2017**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi (Rp)	Rasio Kemandirian %
2016	109.533.498.033,54	1.580.120.000	69
2017	149.423.884.652,06	1.013.400.000	147

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Batu meningkat. Pada tahun 2016 mencapai tingkat yang baik, sedangkan pada tahun 2017 tingkat kemandirian daerah Kota Batu mencapai tingkat yang sangat baik.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut pedoman persentase efektivitas keuangan daerah, melalui kepmendagri No.690.900.327

**Tabel 4.12**  
**Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Rasio efektivitas perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Berikut pedoman penilaian tingkat efisiensi menurut kepmendagri No. 690.900.327:

**Tabel 4.13**  
**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi</b>
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Berikut hasil perhitungan rasio Efektifitas Daerah Kota Batu dapat dilihat pada table 4.9, dan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 4.10 :

**Tabel 4.14**  
**Perhitungan Rasio Efektifitas Daerah Kota Batu tahun 2016-2017**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Target penerimaan PAD yang diterapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah (Rp)	Rasio Efektifitas %
2016	109.533.498.033,54	117.751.331.260,21	93
2017	149.423.884.652,06	145.865.571.206,69	102

Sumber : Data diolah

Dalam data diatas Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD pada tahun 2016 efektif sedangkan pada tahun 2017 sangat efektif.

**Tabel 4.15**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Daerah Kota Batu tahun 2016-2017**

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektifitas %
2016	39.180.028.293	109.533.498.033,54	36
2017	51.021.281.139	149.423.884.652,06	34

Sumber : Data diolah

Dalam tabel diatas bahwa efisiensi dalam melakukan pemungutan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Batu pada tahun 2016-2017 Rasio dikatakan sangat efisien, yang berarti kinerja dalam melakukan pemungutan pendapatan sudah baik.

## 2. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal yang digunakan cenderung semakin kecil. Sampai saat ini belum adanya pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Abdul Halim, 2012). Berikut analisis rasio belanja rutin dan belanja pembangunan Pemerintah Kota Batu:

**Tabel 4.16**  
**Rasio Belanja Rutin terhadap PAD**

Tahun	Total Belanja Rutin (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Rutin %
2016	605.010.937.005,98	780.506.520.832,98	36
2017	585.016.175.525,85	728.420.680.465,85	34

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table 4.11 bahwasannya persentase belanja rutin pada tahun 2016 sebesar 36% dan persentase 2017 34%. Berdasarkan persentase

tersebut berarti belanja rutin pada Pemerintah Daerah Kota Batu tidak terlalu besar dalam pengeluaran belanjanya.

**Tabel 4.17**

**Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD**

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal %
2016	174.368.708.327,00	780.506.520.832,98	22
2017	142.582.940.940,00	728.420.680.465,85	19

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table 4.12 bahwasannya persentasi belanja pembangunan pada tahun 2016 sebesar 22% sedangkan tahun 2017 sebesar 19%. Melihat persentase tersebut yang berarti pada belanja pembangunan Pemerintah Daerah tidaklah terlalu besar.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Batu maka harus menganalisis dengan menggunakan rasio pertumbuhan, hasil perhitungan rasio pertumbuhan Daerah Kota Batu yaitu:

**Tabel 4.18**  
**Rasio Pertumbuhan Periode 2016**

Tahun 2015 Realisasi	Tahun 2016 Realisasi	Rasio Pertumbuhan (%)
725.754.996.854,34	109.553.498.033,54	(85)

Sumber : Data diolah

Sesuai rasio pertumbuhan diatas persentase pada tahun 2016 kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dilihat dari persentase sebesar (85%) dapat diartikan bahwa rasio pertumbuhannya itu tidak baik.

**Tabel 4.19**  
**Rasio Pertumbuhan Periode 2017**

Tahun 2016 Realisasi	Tahun 2017 Realisasi	Rasio Pertumbuhan (%)
109.553.498.033,54	149.423.884.652,06	36

Sumber : Data diolah

Berdasarkan rasio pertumbuhan yang diatas bahwa pada tahun 2017 kemampuan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dilihat dari persentase sebesar 36% dapat diartikan bahwa rasio pertumbuhannya meningkat dari tahun sebelumnya.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dianalisis sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, yaitu:

##### **1. Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya transparansi laporan keuangan yang ada di Pemerintah Kota Batu, dan kurang updatenya laporan

keuangan yang ada dalam website Pemerintah Kota Batu. Hal tersebut bertolak belakang dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58, yang menjelaskan tentang:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dalam Surat tersebut menjelaskan bahwasannya amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan yang ada di Pemerintah Kota Batu laporan keuangan tidak disampaikan begitu saja, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, baik *via online* ataupun datang langsung ke Pemerintah Kota Batu.

## 2. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Berdasarkan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu, dari item item yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah menunjukkan persentase yang cukup baik, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu tergolong cukup luas dan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah. Untuk penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Batu telah mengungkapkan informasi mengenai nama, cakupan, periode pelaporan secara jelas, dan dapat dilihat adanya keinginan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu untuk meningkatkan tingkat pengungkapannya. Berdasarkan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu sudah baik, maka peneliti akan menganalisis varians pendapatan dan belanja.

### 3. Varians Pengeluaran

#### 1) Varians Pendapatan

Pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran pendapatan daerah. Pada Selisih negatif ini mencerminkan bahwa kurang optimalnya pemerintah dalam menggali dan memungut potensi pendapatan daerah yang ada, dikarenakan kurangnya kinerja dalam pemungutan tunggakan pendapatan pajak pengusaha hiburan di Pemerintah Kota Batu, sehingga Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami kebocoran anggaran di sektor penerimaan pendapatan pajak hiburan, seharusnya Pemerintah Kota Batu bisa mendapatkan pendapatan lebih besar dari anggaran karena menurut data yang didapatkan dari MCW (*Malang Corruption Witch*) anggaran pendapatan pada pajak hiburan sangat kecil jika dilihat dari potensi yang seharusnya didapatkan oleh Pemerintah Kota Batu.

#### 2) Varians Pengeluaran

##### a. Varians Belanja Rutin

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa belanja rutin pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja, yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian terjadi adanya efisiensi atau penghematan anggaran, pada tahun 2016 dari total APBD dan pada tahun 2017. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentase memang

tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang cukup signifikan dan dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja.

#### b. Varians Belanja Investasi/Modal

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa belanja modal pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentase memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang cukup signifikan dan dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja modal sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) untuk meningkatkan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Batu.

Dengan hasil varians belanja rutin yang lebih tinggi daripada varians belanja investasi/modal dapat disimpulkan bahwa belanja rutin lebih diprioritaskan daripada belanja modal. Hal ini bertolak belakang dengan Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang menjelaskan :

*” Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu.*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh merugikan manusia dengan cara memprioritaskan sesuatu, seharusnya kota Batu menyamaratakan anggaran belanja, antara belanja rutin dengan belanja modal, karena belanja modal sangat

dibutuhkan oleh Kota Batu dalam upaya pembangunan Kota Batu itu sendiri, selain itu hasil dari belanja modal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Pemerintah Kota Batu.

4. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Batu, berikut merupakan rasio keuangan Kota Batu:

1) Rasio kemandirian dan kemampuan daerah

Hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Batu terhadap sumber dana eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, sedangkan pada tahun 2017 menunjukkan hubungan *delegatif* artinya campur tangan dana eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) sudah tidak ada.

2) Hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD sudah baik, sedangkan pada tahun 2017 kemampuan Pemerintah Daerah tidak efektif dalam merealisasikan PAD berdasarkan potensi riil Daerah Kota Batu.

- 3) Dengan hasil persentase dibawah 60% yang berarti rasio pemungutan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Batu dikatakan efisien, yang berarti dalam pemungutan pendapatan Kota Batu telah sesuai dengan yang dianggarkan.
- 4) Dari hasil persentase belanja rutin dan belanja pembangunan dapat disimpulkan bahwa persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin lebih besar daripada persentase belanja modal/pembangunan. Maka dalam Pemerintah Daerah Kota Batu adanya belanja yang diprioritaskan oleh Kota Batu. Dan Pemerintah Daerah Kota Batu lebih memprioritaskan belanja rutin daripada belanja modal, jika dilihat dari nominal belanja rutin yang sangat besar daripada belanja modal/pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah terhadap masyarakat sangat kurang.
- 5) Dari hasil persentase yang meningkat dari tahun sebelumnya, yang berarti pertumbuhan Kota Batu pada tahun 2017 dapat dikatakan baik, dan Pemerintah Daerah Kota Batu telah mampu meningkatkan pertumbuhannya dari periode sebelumnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara umum tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu tergolong pengungkapan yang baik sehingga terdapat informasi yang cukup luas. Namun transparansi laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Batu sendiri masih kurang, padahal menurut Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik laporan keuangan suatu entitas wajib untuk di publish. Kemampuan entitas untuk tidak mempublish laporan keuangan mencerminkan bahwa kinerja keuangan sendiri menjadi tidak baik, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.
2. Dilihat dari varians pendapatan daerah kota Batu selama periode 2016-2017, secara umum dapat dikatakan kurang baik karena kurangnya pengoptimalan Pemerintah dalam menggali dan memungut potensi pendapatan Daerah yang ada di Pemerintah Kota Batu, dan jika dilihat dari varians pengeluaran daerah periode 2016-2017, dapat dikatakan bahwa belanja rutin lebih diprioritaskan daripada belanja modal/investasi, seharusnya yang harus lebih diprioritaskan adalah belanja modal/investasi, karena belanja modal/investasi itu

sendiri mencakup tentang pembangunan Pemerintah Kota Batu yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan Daerah dapat dikatakan sangat baik karena hubungan delegatif antara pusat Pemerintahan Daerah dan pemerintahan pusat sangat rendah, dilihat dari rasio efektifitas daerah kota Batu dalam merealisasikan PAD tahun 2017 sangat efektif, dilihat dari rasio efisiensi dalam melakukan pemungutan daerah kota Batu tahun 2016-2017 dapat dikatakan sangat efisien, dilihat dari rasio belanja rutin terhadap PAD Pemerintah Daerah Kota Batu periode 2016-2017 dapat dikatakan baik, dilihat dari rasio belanja pembangunan terhadap PAD 2016-2017 dikatakan kurang baik karena dalam pembangunan pemerintah kota Batu masih lambat, dan mengalami penurunan, dan jika dilihat dari rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan baik karena rasio pertumbuhannya meningkat dari tahun sebelumnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama diharapkan lebih mendalam dalam melakukan analisis, karena dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan bahwa penelitian ini hanya menggali sampai tahap apakah informasi pengungkapan yang ada di PP 71

Tahun 2010 sudah diungkapkan atau sudah dipatuhi oleh masing-masing Daerah.

2. Untuk Pemerintah Kota Batu, berkaitan dengan jumlah target pendapatan pajak hiburan disarankan untuk ditingkatkan sehingga belanja potensi pendapatan daerah juga meningkat. Selanjutnya, meningkatkan belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Afifah, Nunuy Nur. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Chariri, Anis dan Ghazali Imam. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Girsang, Heri Atapson, dan Yuyetta, Etna Nur. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012)". *Jurnal Of Accounting*, Vol 4, no.4

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasanah, Nuramalia dan Achmad, Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Medias.

Karlina, Anis dan Handayani, Nur. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol.6, no.3.

Kieso, Donald. E, Jerry J Weydant dan Terry D. Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate: Jilid 3*. Jakarta: Erlangga.

Kusumadewi, Wahidah Niken. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014". *Jurnal EMBA*, vol.4, n0.1

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Martani, Dwi, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat

Medyanatul. 2017. “Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Moleong, L.J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Putri, Sany Eka. <http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/01/hasil-audit-bpk-di-kota-batu-wtp-tapi-ada-proyek-yang-kena-denda>. Diakses 1 Juni 2017

Punka, Aji Ari. “Dewanti Wajibkan Pejabat dan ASN PEMKOT Batu Perbaiki Kinerja”. <http://website.batukota.go.id/berita-2576-dewanti-wajibkan-pejabat-dan-asn-pemkot-batu-perbaiki-kinerja>. Diakses 07 Februari 2018.

Tama, Annafi Indra. 2015. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009”. JRAK, vol 6, no.2

Simbolon, Henny A.U. dan Kurniawan, Christophorus Heni. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia”. ISSN, vol. 30 (1): 54-70

Suwardjono. 2008. *Teori AkuntansiPerekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPEE. Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<https://www.batukota.go.id/>

<https://mcw-malang.org/>

The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a grey border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" in a light green font along the top edge and "PUSAT PERPUSTAKAAN" along the bottom edge. In the center, there is a large, stylized yellow calligraphic emblem.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## NERACA PEMERINTAH KOTA BATU

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

dalam Rupiah

Uraian	Ref	2016	2015
<b>ASET</b>	5.3.1		
<b>ASET LANCAR</b>	5.3.1.a		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1	70,003,101,037.63	89,497,859,098.45
Kas di Bendahara Penerimaan		1,697,000.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	209,560,710.00
Kas di BLUD		0.00	0.00
Kas Lainnya		0.00	0.00
Setara Kas		0.00	0.00
Kas di Bendahara FKTP		2,250,924,952.17	1,994,366,969.79
Kas di Bendahara BOS		1,070,592,314.53	0.00
Investasi Jangka Pendek		0.00	0.00
Piutang Pajak	5.3.1.a.2	56,804,785,808.68	53,109,156,526.68
Piutang Retribusi		763,537,667.00	555,096,782.00
Penyisihan Piutang		(41,849,998,817.83)	(30,347,890,881.72)
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.a.3	1,925,766,544.08	1,481,629,337.95
Piutang Dana Bagi Hasil		15,079,542,299.00	4,718,074,894.00
Piutang Lainnya		4,712,042,661.43	4,499,997,863.00
Persediaan	5.3.1.a.4	5,327,430,097.99	3,901,719,963.62
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>116,089,421,564.69</b>	<b>129,619,571,263.77</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.3.1.b		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi		0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
Dana Bergulir		0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang		0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	0.00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		22,760,573,286.00	20,739,238,214.00
Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>22,760,573,286.00</b>	<b>20,739,238,214.00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>22,760,573,286.00</b>	<b>20,739,238,214.00</b>
<b>ASET TETAP</b>	5.3.1.c		
Tanah	5.3.1.c.1	552,810,090,125.00	210,138,666,680.00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2	279,140,403,200.58	200,185,518,042.78
Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3	466,193,176,660.56	503,864,079,934.20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.c.4	491,109,599,326.38	393,572,361,536.00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5	33,761,503,980.25	32,423,201,667.25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6	45,478,404,069.84	5,923,490,381.84
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7	(407,460,631,802.01)	(329,540,822,806.74)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>1,461,032,545,560.60</b>	<b>1,016,566,495,435.33</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		0.00	0.00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	5.3.1.d		
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.d.1	378,433,000.00	31,050,000.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00

Uraian	Ref	2016	2015
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.d.2	3,762,710,027.00	3,367,029,127.00
Aset Lain-lain	5.3.1.d.3	49,087,850,632.21	50,883,941,532.15
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.d.4	(1,655,069,380.00)	(1,400,344,500.00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>51,573,924,279.21</b>	<b>52,881,676,159.15</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,651,456,464,690.50</b>	<b>1,219,806,981,072.25</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	5.3.2		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.3.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0.00	0.00
Utang Bunga		0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka		132,583,333.33	24,250,000.00
Utang Belanja		24,816,000.00	12,199,817,864.00
Utang Jangka Pendek Lainnya		778,374,472.00	5,726,795,098.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>935,773,805.33</b>	<b>17,950,862,962.00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>935,773,805.33</b>	<b>17,950,862,962.00</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	5.3.3	1,650,520,690,885.16	1,201,856,118,110.27
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1,651,456,464,690.50</b>	<b>1,219,806,981,072.27</b>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA BATU**  
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	2017	2016
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	135,810,562,710.66	70,003,101,037.63
Kas di Bendahara Penerimaan	2,052,209.00	1,697,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,570,322.00	0.00
Kas di BLUD	0.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00
Kas di Bendahara Dana Bergulir	21,122,014.15	0.00
Kas di Bendahara FKTP	2,333,749,840.73	2,250,924,952.17
Kas di Bendahara BOS	101,410,126.74	1,070,592,314.53
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pajak	65,403,985,323.00	56,804,785,808.68
Piutang Retribusi	709,770,542.00	763,537,667.00
Penyisihan Piutang	(45,067,722,900.82)	(41,849,998,817.83)
Belanja Dibayar Dimuka	197,554,580.27	1,925,766,544.08
Piutang Dana Bagi Hasil	14,851,222,679.00	15,079,542,299.00
Piutang Lainnya	2,629,158,750.00	4,712,042,661.43
Persediaan	4,138,563,937.09	5,327,430,097.99
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>181,133,000,133.82</b>	<b>116,089,421,564.69</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya	26,800,573,286.00	22,760,573,286.00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>26,800,573,286.00</b>	<b>22,760,573,286.00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>26,800,573,286.00</b>	<b>22,760,573,286.00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>26,800,573,286.00</b>	<b>22,760,573,286.00</b>
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan	533,274,119,946.00	552,810,090,125.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	315,181,028,363.58	279,140,403,200.58
Aset Tetap Lainnya	500,784,122,409.56	466,193,176,660.56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	537,403,046,050.38	491,109,599,326.38
Akumulasi Penyusutan	33,552,287,670.25	33,761,503,980.25
	23,815,382,150.84	45,478,404,069.84
	(465,984,987,747.42)	(407,460,631,802.01)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,478,024,998,843.19</b>	<b>1,461,032,545,560.60</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan		
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud	361,733,000.00	378,433,000.00
Aset Lain-lain	0.00	0.00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	13,628,876,471.00	3,762,710,027.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>37,539,269,245.22</b>	<b>49,087,850,632.21</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>45,970,541,214.36</b>	<b>51,573,924,279.21</b>
	<b>1,731,929,113,477.37</b>	<b>1,651,456,464,690.50</b>

Uraian	2017	2016
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	80,666,666.66	132,583,333.33
Utang Belanja	7,115,394,255.00	24,816,000.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2,925,156,011.00	778,374,472.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>10,121,216,932.66</b>	<b>935,773,805.33</b>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>10,121,216,932.66</b>	<b>935,773,805.33</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1,721,807,896,544.71</b>	<b>1,650,520,690,885.16</b>
	<b>1,731,929,113,477.37</b>	<b>1,651,456,464,690.50</b>

WALIKOTA BATU  
DEWANTI RUMPOKO





## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	5.1.1	<b>826,995,638,282.88</b>	<b>803,450,046,047.54</b>	<b>97.15</b>	<b>725,754,996,854.34</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	5.1.1.a	<b>117,751,331,260.21</b>	<b>109,533,498,033.54</b>	<b>93.02</b>	<b>104,233,584,925.34</b>
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.a.1	94,100,000,000.00	88,757,389,919.00	94.32	83,692,699,934.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.a.2	7,315,388,400.00	5,855,560,775.00	80.04	5,209,867,148.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.a.3	2,152,462,133.00	2,152,462,133.00	100.00	2,177,429,333.26
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.a.4	14,183,480,727.21	12,768,085,206.54	90.02	13,153,588,510.08
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	5.1.1.b	<b>709,244,307,022.67</b>	<b>693,263,750,014.00</b>	<b>97.75</b>	<b>621,521,411,929.00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.b.1	636,897,400,000.00	624,840,719,033.00	98.11	503,746,629,211.00
Bagi Hasil Pajak - LRA		31,015,373,000.00	32,435,023,935.00	104.58	13,596,894,547.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		26,835,568,000.00	18,882,063,346.00	70.36	35,615,656,664.00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		480,460,016,000.00	480,460,016,000.00	100.00	413,219,693,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		0.00	0.00	0.00	38,793,240,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan P3K2 - LRA		0.00	0.00	0.00	2,521,145,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA		22,159,816,000.00	17,207,864,000.00	77.65	0.00
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD) - LRA		44,101,167,000.00	44,101,166,752.00	100.00	0.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA		32,325,460,000.00	31,754,585,000.00	98.23	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.b.2	14,572,714,000.00	0.00	0.00	62,659,864,000.00
Dana Penyesuaian - LRA		14,572,714,000.00	0.00	0.00	62,659,864,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.b.3	55,963,173,022.67	66,842,910,981.00	119.44	53,169,725,718.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		55,963,173,022.67	66,842,910,981.00	119.44	53,169,725,718.00
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.b.4	1,811,020,000.00	1,580,120,000.00	87.25	1,945,193,000.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		1,811,020,000.00	1,580,120,000.00	87.25	1,945,193,000.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>		<b>0.00</b>	<b>652,798,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.c	0.00	652,798,000.00	0.00	0.00
<b>BELANJA</b>	5.1.2	<b>859,790,122,051.82</b>	<b>780,506,520,832.98</b>	<b>90.78</b>	<b>797,294,924,728.00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.a	<b>649,196,998,456.06</b>	<b>605,010,937,005.98</b>	<b>93.19</b>	<b>514,622,085,866.00</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	323,221,952,453.94	308,088,979,621.00	95.32	279,791,171,091.00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	239,134,104,002.12	198,828,565,414.98	83.15	147,571,270,561.00
Belanja Hibah	5.1.2.a.3	76,909,451,400.00	90,188,121,331.00	117.27	72,101,770,068.00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	9,931,490,600.00	7,905,270,639.00	79.60	15,157,874,146.00
<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.b	<b>209,342,923,595.76</b>	<b>174,368,708,327.00</b>	<b>83.29</b>	<b>281,882,302,047.00</b>
Belanja Modal Tanah		2,076,500,000.00	1,908,720,000.00	91.92	6,437,070,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		69,739,848,467.76	54,627,097,555.00	78.33	21,941,586,044.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		62,090,898,011.00	47,452,603,915.00	76.42	186,782,755,336.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		73,251,311,117.00	68,385,857,557.00	93.36	64,285,639,225.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		978,461,000.00	887,597,400.00	90.71	2,435,251,442.00
Belanja Modal Aset Lainnya		1,205,905,000.00	1,106,831,900.00	91.78	0.00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.c	<b>1,250,200,000.00</b>	<b>1,126,875,500.00</b>	<b>90.14</b>	<b>790,536,815.00</b>
Belanja Tak Terduga		1,250,200,000.00	1,126,875,500.00	90.14	790,536,815.00
<b>TRANSFER</b>	5.1.2.d	<b>55,697,742,299.30</b>	<b>39,180,028,293.00</b>	<b>70.34</b>	<b>22,456,151,759.00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	5.1.2.d.1	<b>8,156,890,439.10</b>	<b>8,156,890,439.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	0.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		656,890,439.10	656,890,439.00	100.00	0.00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.2.d.2	<b>47,540,851,860.20</b>	<b>31,023,137,854.00</b>	<b>65.26</b>	<b>22,456,151,759.00</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		46,861,065,660.20	30,343,351,654.00	64.75	21,776,365,559.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		679,786,200.00	679,786,200.00	100.00	679,786,200.00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(88,492,226,068.24)</b>	<b>(16,236,503,078.44)</b>	<b>18.35</b>	<b>(93,996,079,632.66)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.3				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.a	<b>91,492,226,068.24</b>	<b>91,492,226,068.24</b>	<b>100.00</b>	<b>185,488,305,700.90</b>
Penerimaan SilPA		91,492,226,068.24	91,492,226,068.24	100.00	185,488,305,700.90
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.b	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100.00	0.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	5.1.4	<b>88,492,226,068.24</b>	<b>88,492,226,068.24</b>	<b>100.00</b>	<b>185,488,305,700.90</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0.00</b>	<b>72,255,722,989.80</b>	<b>0.00</b>	<b>91,492,226,068.24</b>



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

UR ATA	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>859,991,508,077.69</b>	<b>849,443,727,270.06</b>	<b>98.77</b>	<b>803,450,046,047.54</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>145,865,571,206.69</b>	<b>149,423,884,652.06</b>	<b>102.44</b>	<b>109,533,498,033.54</b>
- LRA Pendapatan Pajak Daerah - LRA	106,116,664,136.00	113,854,910,066.00	107.29	88,757,389,919.00
- LRA Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7,639,973,391.00	4,899,198,825.00	64.13	5,855,560,775.00
- LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2,360,797,996.69	2,360,797,996.69	100.00	2,152,462,133.00
- LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	29,748,135,683.00	28,308,977,764.37	95.16	12,768,085,206.54
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>714,125,936,871.00</b>	<b>700,019,842,618.00</b>	<b>98.02</b>	<b>693,263,750,014.00</b>
- LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	623,287,894,000.00	589,620,610,974.00	94.60	624,840,719,033.00
- LRA Bagi Hasil Pajak - LRA	33,227,197,000.00	26,856,622,417.00	80.83	32,435,023,935.00
- LRA Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27,538,805,000.00	16,589,173,725.00	60.24	18,882,063,346.00
- LRA Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	474,779,517,000.00	474,779,517,000.00	100.00	480,460,016,000.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	21,703,787,000.00	15,944,561,700.00	73.46	17,207,864,000.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	0.00	0.00	0.00	44,101,166,752.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	47,716,632,000.00	41,123,424,132.00	86.18	31,754,585,000.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	18,321,956,000.00	14,327,312,000.00	78.20	0.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	26,352,611,000.00	26,352,611,000.00	100.00	0.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	26,352,611,000.00	26,352,611,000.00	100.00	0.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	63,472,031,871.00	83,033,220,644.00	130.82	66,842,910,981.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	63,472,031,871.00	83,033,220,644.00	130.82	66,842,910,981.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	1,013,400,000.00	1,013,400,000.00	100.00	1,580,120,000.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	1,013,400,000.00	1,013,400,000.00	100.00	1,580,120,000.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	0.00	0.00	0.00	<b>652,798,000.00</b>
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	0.00	0.00	0.00	652,798,000.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	<b>876,795,937,467.49</b>	<b>728,420,680,465.85</b>	<b>83.08</b>	<b>780,506,520,832.98</b>
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	<b>683,194,211,946.49</b>	<b>585,016,175,525.85</b>	<b>85.63</b>	<b>605,010,937,005.98</b>
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	313,322,801,925.49	286,693,806,165.00	91.50	308,088,979,621.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	283,239,583,021.00	210,365,809,914.85	74.27	198,828,565,414.98
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	74,658,177,000.00	77,758,411,850.00	104.15	90,188,121,331.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	11,973,650,000.00	10,198,147,596.00	85.17	7,905,270,639.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	<b>191,601,725,521.00</b>	<b>142,582,940,940.00</b>	<b>74.42</b>	<b>174,368,708,327.00</b>
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	0.00	0.00	0.00	1,908,720,000.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	84,920,091,171.00	59,630,021,824.00	70.22	54,627,097,555.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	62,793,473,592.00	44,634,635,614.00	71.08	47,452,603,915.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	40,854,243,758.00	36,142,669,300.00	88.47	68,385,857,557.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	1,081,910,000.00	479,589,000.00	44.33	887,597,400.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	1,952,007,000.00	1,696,025,202.00	86.89	1,106,831,900.00
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>821,564,000.00</b>	<b>41.08</b>	<b>1,126,875,500.00</b>
- LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	2,000,000,000.00	821,564,000.00	41.08	1,126,875,500.00
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
- Belanja Pegawai				
- Belanja Barang dan Jasa				
- Belanja Hibah				
- Belanja Bantuan Sosial				
<b>BELANJA MODAL</b>				
- Belanja Modal Tanah				
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
- Belanja Modal Aset Lainnya				

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
<b>TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>				
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	51,411,293,600.00	51,021,281,139.00	99.24	39,180,028,293.00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	8,656,890,400.00	8,656,890,340.00	100.00	8,156,890,439.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	100.00	7,500,000,000.00
	656,890,400.00	656,890,340.00	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	656,890,439.00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	42,754,403,200.00	42,364,390,799.00	99.09	31,023,137,854.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	23,222,006,000.00	22,832,005,999.00	98.32	30,343,351,654.00
Transfer Dana Otonomi Khusus	679,786,200.00	679,773,800.00	100.00	679,786,200.00
	18,852,611,000.00	18,852,611,000.00	100.00	0.00
	(68,215,722,989.80)	70,001,765,665.21	(102.62)	(16,236,503,078.44)
<b>SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan SILPA	72,255,722,989.80	72,308,701,558.07	100.07	91,492,226,068.24
	72,255,722,989.80	72,308,701,558.07	100.07	91,492,226,068.24
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4,040,000,000.00	4,040,000,000.00	100.00	3,000,000,000.00
	4,040,000,000.00	4,040,000,000.00	100.00	3,000,000,000.00
<b>PEMBLAYAAN NETTO</b>				
	68,215,722,989.80	68,268,701,558.07	100.00	88,492,226,068.24
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>138,270,467,223.28</b>	<b>0.00</b>	<b>72,255,722,989.80</b>

WALIKOTA BATU

DEWANTI RUMPOKO

## Lampiran 3



**LAPORAN ARUS KAS  
PEMERINTAH KOTA BATU**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

dalam Rupiah

Uraian	Ref	2016	2015
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		88,757,389,919.00	83,692,699,934.00
Penerimaan Retribusi Daerah		5,855,560,775.00	5,209,867,148.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2,152,462,133.00	2,177,429,333.26
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		12,768,085,206.54	13,154,530,181.08
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		32,435,023,935.00	13,596,894,547.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		18,882,063,346.00	35,615,656,664.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		480,460,016,000.00	413,219,693,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		93,063,615,752.00	41,314,385,000.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		66,842,910,981.00	53,168,784,047.00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0.00	0.00
Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		0.00	62,659,864,000.00
Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		1,580,120,000.00	1,945,193,000.00
Penerimaan Lainnya		652,798,000.00	0.00
<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>		<b>803,450,046,047.54</b>	<b>725,754,996,854.34</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
Pembayaran Pegawai		308,088,979,621.00	266,699,200,977.00
Pembayaran Hibah		74,336,957,800.00	54,519,247,496.00
Pembayaran Bantuan Sosial		7,370,914,749.00	15,157,874,146.00
Pembayaran Bantuan Keuangan		679,786,200.00	679,786,200.00
Pembayaran Tidak Terduga		1,126,875,500.00	790,536,815.00
Pembayaran Barang dan Jasa		215,214,084,835.98	178,245,763,247.00
Transfer Ke Desa		38,500,242,093.00	21,776,365,559.00
<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>		<b>645,317,840,798.98</b>	<b>537,868,774,440.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>158,132,205,248.56</b>	<b>187,886,222,414.34</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>			
Penjualan Tanah		0.00	0.00
Penjualan Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Penjualan Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
Perolehan Tanah		1,908,720,000.00	6,437,070,000.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		54,627,097,555.00	21,941,586,044.00
Perolehan Gedung dan Bangunan		47,452,603,915.00	186,782,755,336.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		68,385,857,557.00	64,285,639,225.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		887,597,400.00	2,435,251,442.00
Belanja Modal Aset Lainnya		1,106,831,900.00	
<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>		<b>174,368,708,327.00</b>	<b>281,882,302,047.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>(174,368,708,327.00)</b>	<b>(281,882,302,047.00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>ARUS KAS MASUK</b>			
Penggunaan SILPA		0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0.00	0.00
<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3,000,000,000.00	0.00

Uraian	Ref	2016	2015
Pembayaran Pokok Utang		0.00	0.00
<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>		<b>3,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b>(3,000,000,000.00)</b>	<b>0.00</b>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
ARUS KAS MASUK			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		60,401,688,255.00	70,342,897,554.00
<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>		<b>60,401,688,255.00</b>	<b>70,342,897,554.00</b>
ARUS KAS KELUAR			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60,401,688,255.00	70,342,897,554.00
Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0.00	
<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>		<b>60,401,688,255.00</b>	<b>70,342,897,554.00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE</b>		<b>(19,236,503,078.44)</b>	<b>(93,996,079,632.66)</b>
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		90,559,053,068.24	184,555,132,700.90
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		70,004,798,037.63	90,559,053,068.24
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN		2,250,924,952.17	933,173,000.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS 2016		1,070,592,314.53	0.00
Saldo Akhir Kas		73,326,315,304.33	91,492,226,068.24

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





**LAPORAN ARUS KAS  
PEMERINTAH KOTA BATU**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	2017	2016
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	ARUS KAS MASUK		
3	Penerimaan Pajak Daerah	113,854,910,066.00	88,757,389,919.00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	4,899,198,825.00	5,855,560,775.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,360,797,996.69	2,152,462,133.00
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28,308,977,764.37	12,768,085,206.54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26,856,622,417.00	32,435,023,935.00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16,589,173,725.00	18,882,063,346.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	474,779,517,000.00	480,460,016,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	71,395,297,832.00	93,063,615,752.00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83,033,220,644.00	66,842,910,981.00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
13	Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26,352,611,000.00	-
14	Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,013,400,000.00	1,580,120,000.00
15	Penerimaan Lainnya	-	652,798,000.00
16	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>849,443,727,270.06</b>	<b>803,450,046,047.54</b>
17	ARUS KAS KELUAR		
18	Pembayaran Pegawai	286,693,806,165.00	308,088,979,621.00
19	Pembayaran Hibah	77,758,411,850.00	74,336,957,800.00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	10,198,147,596.00	7,370,914,749.00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan	679,773,800.00	679,786,200.00
22	Pembayaran Tidak Terduga	821,564,000.00	1,126,875,500.00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	210,365,809,914.85	215,214,084,835.98
24	Transfer Ke Desa	50,341,507,339.00	38,500,242,093.00
25	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>636,859,020,664.85</b>	<b>645,317,840,798.98</b>
26	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>212,584,706,605.21</b>	<b>158,132,205,248.56</b>
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
28	ARUS KAS MASUK		
29	Penjualan Tanah	-	-
30	Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-
31	Penjualan Gedung dan Bangunan	-	-
32	Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
33	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
34	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35	ARUS KAS KELUAR		
36	Perolehan Tanah	-	1,908,720,000.00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin	59,630,021,824.00	54,627,097,555.00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan	44,634,635,614.00	47,452,603,915.00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	36,142,669,300.00	68,385,857,557.00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	479,589,000.00	887,597,400.00
	Beianja Modal Aset Lainnya	1,696,025,202.00	1,106,831,900.00
41	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR</b>	<b>142,582,940,940.00</b>	<b>174,368,708,327.00</b>
42	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(142,582,940,940.00)</b>	<b>(174,368,708,327.00)</b>
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
44	ARUS KAS MASUK		
45	Penggunaan SILPA	-	-
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
47	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
48	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No	Uraian	2017	2016
49	ARUS KAS KELUAR		
50	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
51	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,040,000,000.00	3,000,000,000.00
52	Pembayaran Pokok Utang	-	-
53	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	4,040,000,000.00	3,000,000,000.00
54	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(4,040,000,000.00)</b>	<b>(3,000,000,000.00)</b>
55	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
56	ARUS KAS MASUK		
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	52,206,626,199.81	60,401,688,255.00
58	JUMLAH ARUS KAS MASUK	52,206,626,199.81	60,401,688,255.00
59	ARUS KAS KELUAR		
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52,206,626,199.81	60,401,688,255.00
61	Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	-	-
62	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	52,206,626,199.81	60,401,688,255.00
63	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
64	<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE</b>	<b>65,961,765,665.21</b>	<b>(19,236,503,078.48)</b>
65	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	72,308,701,558.07	90,559,053,068.24
66	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	138,270,467,223.28	70,004,798,037.63
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN		2,250,924,952.14
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS 2016		1,070,592,314.55
69	Saldo Akhir Kas	138,270,467,223.28	73,326,315,304.33

WALIKOTA BATU

DEWANTI RUMPOKO

*Lampiran 4*

HASIL WAWANCARA  
ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM  
PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU

Wawancara 1

Dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi

Informan : Dicky Hartawan, S.E

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi

Peneliti: Bagaimana Struktur Organisasi Kota Batu?

Informan : Dalam struktural Pemerintah Kota Batu menggunakan Desentralisasi, karena Pemerintah Kota Batu punya kebijakan sendiri

Peneliti: Apakah tugas wewenang dilaksanakan sesuai dengan *job desknya* masing masing?

Informan : Iya, tugas tugasnya diemban berdasarkan *job desknya* masing-masing

Peneliti: Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajer?

Informan : Iya, setiap setahun sekali laporan keuangan Pemerintah Kota Batu selalu di cek oleh auditor. Ini kemarin bulan Mei laporan keuangan Pemerintah Kota Batu baru selesai di audit, dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian

Peneliti: Apakah dengan opini wajar tanpa pengecualian tersebut pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu dikatakan baik?

Informan : Iya mba, Karena pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku mba

Peneliti: Apakah ada peraturan yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan Kota Batu?

Informan : Jelas ada

Peneliti: Peraturan yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan tersebut menggunakan peraturan apa?

Informan : Dalam pencatatan laporan keuangan Kota Batu menggunakan pedoman PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah

## Wawancara 2

Dengan Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan

Informan : Dewi Islamiati, S.E., MM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan

Peneliti: Bagaimana penempatan kerja Pemerintah Kota Batu yang ibu ketahui, apakah semua penempatan kerja sesuai dengan skil yang mereka miliki?

Informan : Ada beberapa penempatan kerja yang tidak sesuai dengan skilnya, tetapi kami mengadakan pelatihan

Peneliti: Pelatihan yang dimaksud ini seperti apa?

Informan : Pelatihan yang sesuai dengan bagiannya, andaikan dia dibagian pertanian, tapi dia tidak bisa bercocok tanam, maka disini mengadakan pelatihan tentang bercocok tanam

Peneliti: Bagaimana dengan transparansi Pemerintah Kota Batu?

Informan: Ya untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Batu disini terbuka

Peneliti: Terkait dengan laporan keuangan yang ada di website Pemerintah Kota Batu kenapa tidak bisa di download seperti biasa?

Informan: Terkait itu memang Pemerintah Kota Batu memiliki kebijakan sendiri mba, Pemerintah Kota Batu menerapkan Undang-Undang 14 tahun 2008 dimana jika ingin meminta laporan keuangan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan melampirkan KTP

Peneliti: Kenapa laporan keuangan Pemerintah Kota Batu yang ada di website tidak *update*, yang saya lihat di website hanya ada laporan realisasi anggaran saja dan itupun tahun 2014?

Informan: Iya kemarin kami masih pembaruan sistem, dan data laporan keuangan yang dapat di publikasikan sudah dipinta oleh bagian informasi

## Wawancara 3

Dengan Sekretaris Malang Corruption Watch (MCW)

Informan : Bayu Diktiarsa

Jabatan : Sekretaris Malang Corruption Watch (MCW)

Peneliti: Bagaimana pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu yang Mas ketahui?

Informan : Kalau pengungkapan laporan keuangannya mereka memang bagus, tapi transaksi yang dilakukan mereka tidak selalu benar, dan dalam menganggarkan pendapatannya pun mereka kurang

Peneliti: Yang dimaksud transaksi yang dilakukan tidak selalu benar itu maksudnya seperti apa? Dan kenapa anggaran pendapatan mereka kurang?

Informan : Ya pokoknya transaksinya mereka tidak selalu benar, yang dimaksud anggaran pendapatan mereka kurang bagus itu, potensi pendapatan pajak hiburan mereka itu di atas Rp. 20.000.000, tetapi mereka selalu menganggarkan dibawah Rp. 15.000.000. Padahal jika mereka menganggarkan diatas Rp. 20.000.000 pendapatan mereka akan meningkat.



*Lampiran 5*

**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Nurlaelah  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 13 Juni 1996  
Alamat Asal : Kp. Sukaseuri RT 12 RW 05, Des. Sarimulya,  
Kec. Kotabaru, Karawang  
Alamat Kos : Jl. Joyosuko Metro Merjosari, Lowokwaru Malang  
Telepon/Hp : 0838-1568-8444  
E-Mail : ella.nurlaela132@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2008 : SDN Sarimulya III  
2008-2011 : SMPN 1 Kota Baru  
2011-2014 : SMAN 2 Cikampek  
2014-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
2015 : English Language Center (ELC) UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Sie. Jurnalistik HMJ Akuntansi Periode 2015
- Sekretaris HMJ Akuntansi Periode 2016
- Sekretaris DEMA Fakultas Ekonomi Periode 2017
- Anggota PMII Ekonomi Moch. Hatta

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- Peserta pelatihan manasik haji Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Accounting Study Club “Akuntansi Syariah Filosofis dan Implementasi” Tahun 2015
- Peserta Kuliah Tamu “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” Tahun 2015
- Peserta Seminar “Tantangan Akuntan Menghadapi MEA” Tahun 2015
- Panitia “Accounting Gathering” Tahun 2015
- Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Masjid Posdaya UIN Malang 2016
- Panitia Kuliah Tamu dan Accounting Study Club “Kombinasi Bisnis Syariah” Tahun 2016
- Panitia Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015-2017
- Panitia Economy Festival Tahun 2017

Malang, 27 Juni 2018

Nurlaelah

Lampiran 6

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nurlaelah  
NIM/Jurusan : 14520134/ Akuntansi  
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4 Oktober 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	Λ
2.	8 Januari 2018	Konsultasi Proposal	Λ
3.	31 Januari 2018	Revisi Proposal	Λ
4.	09 Januari 2018	Revisi Proposal	Λ
5.	28 Februari 2018	ACC Proposal	Λ
6.	14 Mei 2018	Konsultasi Bab I-IV	Λ
7.	30 Mei 2018	Konsultasi Bab I-IV	Λ
8.	4 Juni 2018	Konsultasi Bab I-V	Λ
9.	5 Juni 2018	Revisi Bab V	Λ
10.	6 Juni 2018	Acc Keseluruhan	Λ

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005